

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN LIMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(STUDI DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Odi Saputra
NPM : 147310475**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan berkah, rahmat, hidayah, insiprasi, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya dengan baik. Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Baginda Nabi Basar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam semoga tercurah kepada beliau beserta keluarga dan para sahabatnya dan semoga kita tergolong pada orang-orang ahli surga, Amin.

Pembuatan Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)” bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dibidang ilmu sosial di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pada penyusunan Skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dan semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang setimpal. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi baik moral maupun materil, terutama kepada :

1. Prof. DR. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIR, Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia. M.Si yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam menimbah ilmu di Fakultas yang beliau pimpin.

3. Budi Muliando, S.IP., M.Si. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan yang selalu mendukung dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.
4. Ibu Dra. Hj. Monalisa., M.Si yang bertindak selaku Dosen Pembimbing I yang selalu mendukung dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Syaprianto, S.Sos., M.IP yang dengan sabar selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyempurnaan penulisan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini serta seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Kepada keluarga tercinta saya, terutama kepada ayahanda dan ibunda saya yang telah berjasa bersusah payah membesarkan, membina, menyekolahkan dan memberikan perhatian yang sangat besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

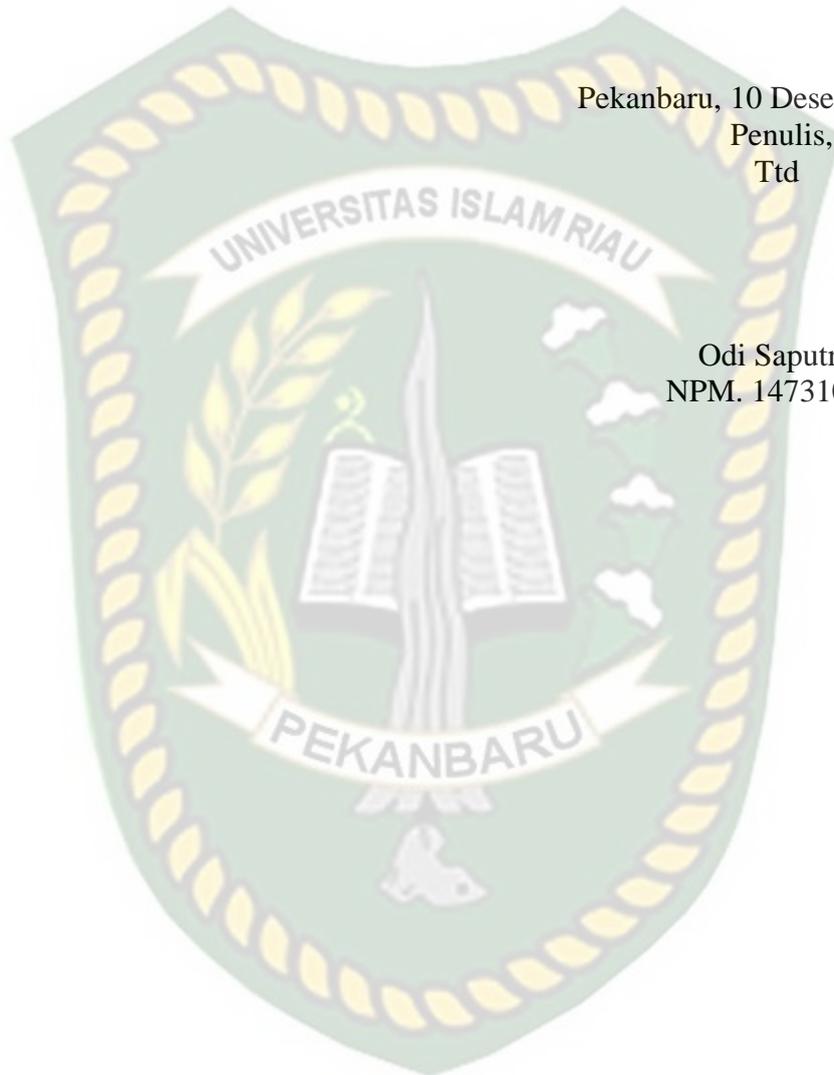
Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat positif dan membangun diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan Skripsi.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa. Wabillahittaufikwalhidaayah, wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pekanbaru, 10 Desember 2019

Penulis,
Ttd

Odi Saputra
NPM. 147310475



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	25
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	26
1. Tujuan Peneliatian.....	26
2. Kegunaan Peneliatian.....	26
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	27
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	27
2. Konsep Pemerintahan Daerah.....	28
3. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	30
4. Konsep Lingkungan Hidup.....	31
5. Konsep Kebijakan.....	32
6. Konsep Implementasi Kebijakan.....	34
7. Konsep Pengelolaan.....	44
8. Konsep Sampah.....	44
B. Penelitian Terdahulu.....	46
C. Kerangka Pikir.....	47
D. Konsep Operasional.....	48
E. Operasional Variabel.....	50
F. Teknik Pengukuran.....	51
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	55

B. Lokasi Penelitian	55
C. Populasi dan Sampel	56
D. Teknik Penarikan Sampel	57
E. Jenis dan Sumber Data	58
F. Teknik Pengumpulan Data	59
G. Teknik Analisis Data	60
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	60
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Pangkalan Kerinci	62
B. Keadaan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci	63
C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup	66
D. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	68
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	69
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	69
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia	71
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	72
B. Hasil Dan Pembahasan Mengenai Indikator Variabel Terkait Penelitian Berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)	74
1. Komunikasi	75
2. Sumber Daya	80
3. Disposisi	84
4. Struktur Birokrasi	90
C. Rekapitulasi Hasil Penelitian Yang Berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)	94
D. Faktor Penghambat yang Dialami Oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah	98
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran	104
DAFTAR KEPUSTAKAAN	105
LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I. 1	Daftar Nama Kecamatan Dan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017	8
I. 2	Kondisi Sarana Dan Prasarana Persampahan yang ada di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017	1 6
I. 3	Volume Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2017	2 1
II .1	Penelitian Terdahulu terkait dengan penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)	4 6
II .2	Operasional Variabel Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)	5 0
II I.1	Tabel Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)	5 7
II I.2	Jadwal Waktu Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)	6 1
I V.1	Pembagian Luas Wilayah	6 2
I V.2	Pembagian Penduduk Menurut Jenis Kelamin	6 3
I V.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan	6 4
V .1	Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Petugas Kebersihan	7 0
V .2	Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat	7 0
V .3	Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Petugas Kebersihan	7 1
V .4	Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat	7 2
V .5	Klasifikasi responden menurut latar belakang Jenjang Pendidikan Petugas Kebersihan	7 3

V	Klasifikasi responden menurut latar belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat	7 4
.6		
V	Distribusi frekuensi tanggapan responden Petugas Kebersihan terhadap Indikator Komunikasi	7 6
.7		
V	Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Indikator Komunikasi	7 7
.8		
V	Distribusi frekuensi tanggapan responden Petugas Kebersihan terhadap Indikator Sumber Daya	8 1
.9		
V	Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Indikator Sumber Daya	8 2
.10		
V	Distribusi frekuensi tanggapan responden Petugas Kebersihan terhadap Indikator Disposisi	8 6
.11		
V	Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Indikator Disposisi	8 7
.12		
V	Distribusi frekuensi tanggapan responden Petugas Kebersihan terhadap Indikator Struktur Birokrasi	91
.13		
V	Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Indikator Struktur Birokrasi	92
.14		
V	Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden Petugas Kebersihan Terkait Dengan Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)	96
.15		
V	Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Terkait Dengan Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)	97
.16		

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II	Kerangka Pikir Peneitian Yang Berjudul Tentang	4
.I	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)	7
I	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	6
V.I	Pelalawan	8



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Daftar Kuesioner Petugas Kebersihan Terkait Dengan Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)	1 07
2	Daftar Kuesioner Masyarakat Terkait Dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)	1 13
3	Daftar Wawancara Terkait Dengan Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)	1 19
4	Daftar Rekap Telly Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci) (Petugas Kebersihan)	1 22
5	Daftar Rekap Telly Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci) (Masyarakat)	1 23
6	Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi: Pengawasan Waktu Operasional Cafe Di Kecamatan Marpoyan Damai) (Masyarakat)	1 25
7	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terkait Judul Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)	1 35
9	Surat Balasan dari Dinas Lingkungan Hidup Terkait Judul Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)	1 36

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Odi Saputra
NPM : 147310475
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi penulis telah sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Desember 2019
Pelaku Pernyataan,



Odi Saputra

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PELALAWAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH
(STUDI DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI)**

ABSTRAK

Oleh
Odi Saputra

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci). Indikator dari penelitian ini adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Tipe penelitian yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan ini adalah Survey Deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Adapun populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Petugas Kebersihan, Masyarakat. Adapun Teknik Sampling Jenuh untuk populasi pegawai dan teknik *Purposive Sampling* untuk petugas kebersihan dan masyarakat, jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci) mendapatkan jawaban pada kategori “Cukup Terimplementasi”.

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF PELALAWAN
REGENCY NUMBER 7 2015 ABOUT WASTE MANAGEMENT
(Study In Pangkalan Kerinci District)**

ABSTRACT

By

Odi Saputra

Keywords: Implementation, Regional Regulation, Waste Management

This study aims to determine the Implementation of Pelalawan District Regulation No. 7 of 2015 concerning Waste Management (Study in Pangkalan Kerinci District). Indicators of this study are Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. This type of research located in Pelalawan Regency is a Descriptive Survey, which prioritizes the questionnaire list as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objective existence of the research objectives at the location under study. The population used in this study is the Head of the Department of the Environment, the Head of Waste Management, the Cleaning Officer, the Community. The Saturated Sampling Technique for the employee population and the Purposive Sampling technique for janitors and the community, the types and data collection techniques used in this study consisted of, primary data collected using questionnaires and interviews and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use the frequency table tool. Based on this analytical technique, the researcher assessed and concluded that the study with the title Implementation of Pelalawan District Regulation Number 7 Year 2015 Regarding Waste Management (Study in Pangkalan Kerinci District) received an answer in the category of "Fairly Implemented".

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari Negara ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah. Fungsi utama Pemerintahan adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka aparat yang menjalankan fungsi Pemerintahan itu adalah pengemban tugas pelayanan kepada masyarakat jadi bukan sebaliknya untuk minta dilayani oleh masyarakat, Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan Umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang”. Tindak lanjut dari pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah, Daerah diberi otonomi seluas-luasnya dalam mengatur, mengurus dan menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dan dalam pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan Pemerintahan Absolut, urusan Pemerintahan Konkuren, dan urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kedaerah sebagai dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan urusan Pemerintahan Umum adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari urusan Pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan wajib terdiri dari atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, jenis urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan;
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga Kerja;
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan Hidup;
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah;
- l. Penanaman Modal;
- m. Kepemudajaan dan Olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan dan ;
- r. Kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi :

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian dan ;
- h. Transmigrasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 17 ayat 1 bahwa Daerah Berhak Menetapkan Kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah dan Pemerintahan Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dari sejumlah urusan-urusan wajib tersebut, salah satunya adalah menangani urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah. Didalam Pasal 3 dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Mengatur Tentang :

- a. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. Kompensasi;
- d. Pengembangan dan penerapan Teknologi;
- e. Sistem informasi
- f. Peran Masyarakat
- g. Pembinaan

Dari sekian banyak urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan, yang salah satunya adalah urusan pemerintahan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Adapun tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Kedudukan, Susunan Orang, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi “Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Pelalawan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan di Bidang Lingkungan Hidup”. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi, adapun fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan pada Pasal 3 yang berbunyi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- b. Pengkajian, perumusan, penyusunan kebijakan teknis Daerah di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup;
- d. Penyelenggaraan perencanaan lingkungan hidup tingkat Daerah;
- e. Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan, rencana dan program (KRP) tingkat Daerah;
- f. Pengelolaan kualitas lingkungan dan pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan;
- g. Pengelolaan keanekaragaman hayati skala Daerah;
- h. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sesuai dengan kewenangan Daerah;
- i. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) sesuai dengan kewenangan Daerah;
- j. Penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait PPLH yang berada di Daerah;
- k. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hidup tingkat Daerah;
- l. Penyelenggaraan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah;
- m. Penyelesaian pengaduan masyarakat, fasilitas penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan hidup tingkat Daerah;
- n. Pengelolaan persampahan skala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- o. Penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Daerah;
- p. Pengendalian perubahan iklim Skala Daerah;

- q. Pengembangan dan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan di bidang lingkungan hidup;
- r. Pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup skala Daerah;
- s. Pengelolaan informasi lingkungan hidup tingkat Daerah;
- t. Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Daerah;
- u. Penyelenggaraan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) pada tingkat Daerah;
- v. Pelaksanaan dukungan bersifat sebtantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- w. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- x. Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- y. Pengawasan dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- z. Memonitoring dan evaluasi terhadap kegiatan serta sistem pengendalian intern Pemerintah Daerah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- aa. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Dari penjelasan uraian tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sampah, maka penulis ingin meneliti mengenai Implementasi Pengelolaan Sampah. Berdasarkan tinjauan pada fungsi diatas diperlukan Implementasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan khususnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci melalui Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya dapat dilihat susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Seksi Inventarisasi, RPPLH Dan KLHS

- b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- 4. Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengurangan Sampah
 - b. Seksi Penanganan Sampah
 - c. Seksi B3 dan Limbah B3
- 5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemantauan Lingkungan
 - b. Seksi Pencemaran Lingkungan
 - c. Seksi Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan
- 6. Bidang Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan konservasi Sumber Daya Alam
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah untuk mengurangi volume sampah pada Seksi Penanganan Sampah yang memiliki uraian tugas pada pasal 17 ayat (2) yakni :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bidang;
- b. Perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten/Kota;
- c. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah;
- d. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- e. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- f. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST DAN TPA sampah;
- g. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan pembuangan open dumping;
- h. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- i. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

- j. Pelaksanaan kerja sama dengan Kabupaten/Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- k. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- l. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- m. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak lain (badan usaha);
- o. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- q. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan Bidang tugasnya.

Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.948 Ha (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau (1.39 %) dari luas Kabupaten Pelalawan. Jarak lurus ibukota Kecamatan dengan ibukota Kabupaten yang terdekat dengan ibukota Kabupaten adalah ibukota Kecamatan Pangkalan Kerinci \pm 0 km. Sedangkan jarak yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Kuala Kampar (Teluk Dalam) sejauh 159,2 km.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan adalah 386.428 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 203.683 jiwa dan perempuan 182.745 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Pangkalan Kerinci yaitu 102.226 jiwa dan terendah di Bandar Pitalangan 13.885 jiwa. Kabupaten

Pelalawan memiliki 12 kecamatan untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel I.1 : Daftar Nama Kecamatan Dan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Kecamatan Langgam	Langgam	26.423 jiwa
2	Kecamatan Pangkalan Kerinci	Pangkalan Kerinci	102.226 jiwa
3	Kecamatan Bandar Sei Kijang	Sei Kijang	23.006 jiwa
4	Kecamatan Pangkalan Kuras	Sorek Satu	52.920 jiwa
No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Penduduk
5	Kecamatan Ukui	Ukui Satu	36.849 jiwa
6	Kecamatan PangkalanLesung	Pangkalan Lesung	29.035 jiwa
7	Kecamatan Bunut	Pangkalan Bunut	13.742 jiwa
8	Kecamatan Pelalawan	Pelalawan	17.798 jiwa
9	Kecamatan Bandar Petalangan	Rawang Empat	13.885 jiwa
10	Kecamatan Kuala Kampar	Teluk Dalam	17.797 jiwa
11	Kecamatan Kerumutan	Kerumutan	20.350 jiwa
12	Kecamatan Teluk Meranti	Teluk Meranti	14.834 jiwa

Sumber :Website Kab. Pelelawan

Pangkalan Kerinci adalah salah satu Kecamatan dari 12 Kecamatan yang bergabung di dalam Kabupaten Pelalawan yang beribukota di Pangkalan Kerinci dengan Jumlah Penduduk 102.226 jiwa. Kecamatan ini memiliki potensi pengembangan karena terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera.Kawasan perkantoran baru di Pangkalan Kerinci ini telah dikembangkan dan dibangun di

kawasan Bukit Seminai yang terletak di arah timur dari kota lama Pangkalan Kerinci tersebut. Kota lama Pangkalan Kerinci semenjak awal perkembangannya telah terpola untuk berkembang secara linier sepanjang tepi kiri kanan jalan yang mengarah ke utara-selatan. Di sebelah barat dari kota lama Pangkalan Kerinci terdapat kawasan perumahan dan industri PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) milik salah satu pengusaha besar Indonesia yang sekarang bermukim di Singapura yang merupakan salah satu industri penghasil bubur kertas dan produk kertas terbesar di dunia yang bahan bakunya diantaranya dipasok dari Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan jenis kayu Akasia.

Dalam meningkatkan kebersihan Kota sangat penting untuk menjaga lingkungan karena lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982). Sedangkan secara umum lingkungan yaitu semua faktor dan keadaan yang berada di luar tubuh yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan organisme atau komunitas organisme itu sendiri. Dan juga didalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dijelaskan dalam Pasal 3 “Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi” sehingga sangat perlu

untuk menjaga lingkungan yang dilandaskan pada asas-asas yang dijelaskan pada Pasal 3 tersebut.

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Sementara didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Sedangkan Secara umum masyarakat mengenal sampah sebagai sesuatu benda yang di hasilkan dari berbagai benda yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi oleh manusia. Pengertian Sampah “Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat dari bahan organik atau anorganik baik benda logam maupun bukan logam yang dapat terbakar dan yang tidak dapat terbakar”. Menurut Hadi (2001) pembagian atau penggolongan sampah adalah:

- a. Sampah Domestik, sampah ini berasal dari pemukiman atau perumahan.
- b. Sampah Komersil, sampah yang di hasilkan dari lingkungan kegiatan perdagangan seperti toko, restoran, rumah makan, pasar, dan swalayan.
- c. Sampah Industri, sampah ini merupakan hasil samping kegiatan industri yang jenisnya sangat tergantung pada kegiatan industri itu sendiri.
- d. Sampah Alami dan lainnya , dapat berupa dedaun, sisa bencana alam dan sebagainya.

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup sampai saat ini belum dapat ditangani dengan baik, terutama di Kota-Kota Besar. Kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya, sehingga sampah menumpuk di mana–mana. Sampah yang tidak terurus dengan baik akan menyebabkan menurunnya kesehatan dan nilai estetika lingkungan

karena pencemaran air, udara dan berkembangnya hama penyakit, sehingga pemukiman penduduk di sekitar tumpukan sampah tersebut tidak layak lagi bagi penduduk.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah. selanjutnya adalah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Sedangkan yang dimaksud dengan tempat pemrosesan sampah atau disingkat dengan TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Dalam pasal 9 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. Penanganan sampah.

Pengurangan sampah meliputi : Pembatasan Timbulan Sampah, Pendaur Ulang Sampah, dan/atau Pemanfaatan kembali Sampah. Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Dinas-Dinas yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan termasuk Dinas Lingkungan Hidup dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Dijelaskan didalam pasal 14 yang menyebutkan bahwa penanganan sampah meliputi kegiatan:

1. Pemilahan;
2. Pengumpulan;
3. Pengangkutan;
4. Pengolahan;
5. Pemrosesan akhir sampah.

Pengelolaan sampah bermula dari pemilihan sampah organik dan anorganik, setelah itu baru dilakukannya pengumpulan sampah mudah terurai dengan sampah yang sulit untuk terurai. Setelah dikumpulkan sampah sesuai dengan tipenya, maka akan dilakukannya pengangkutan tempat pembuangan terakhir dan akan di akan dilakukannya proses pengelolaan sampah. Jadi pemilihan sampah dilakukan oleh setiap orang yang berada pada pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dan wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan. Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi sedikit lima jenis sampah. Sedangkan Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilihan sampah skala Daerah dalam pemilahan sampah harus memiliki sarana untuk memenuhi syarat yaitu seperti jumlah sarana sesuai dengan jenis atau pengelompokan sampah, diberi tanda atau label dan membuat bahan atau wadah atau warna wadah sesuai dengan pengelompokkan sampah.

Sedangkan Pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas

sosial dan fasilitas lainnya dan Pemerintah Daerah pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS, TPS3R dan menyediakan alat pengumpul sampah seperti tong sampah, jumlah armada pengangkut sampah dan yang lainnya, selain itu Pemerintahan Daerah menyediakan TPS dan TPS 3R pada kawasan pemukiman. Dan dalam menyediakan TPS dan TPS 3R adanya sarana pengelompokkan sampah paling sedikit lima jenis sampah, lokasi yang sesuai dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan dan mudah diakses dan tidak mencemari lingkungan sekitar, memiliki jadwal pengangkutan sampah dan pengumpulan sampah.

Pengangkutan sampah Pemerintah Daerah dan lembaga Pengelola yang dibentuk oleh masyarakat, Pemerintahan daerah wajib menyediakan alat angkut sampah termasuk lima jenis sampah tersebut agar tidak mencemari lingkungan dan melakukan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Dan pengelolaan sampah meliputi kegiatan seperti pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energi, sedangkan pemrosesan akhir sampah (TPA) Pemerintah Daerah menyediakan lokasi pembuangan sampah yang jauh dari manusia dan tidak mencemari lingkungan. Menumpuknya sampah mengakibatkan pencemaran lingkungan dan mengganggu aktivitas masyarakat selain yang berserakan aroma sampah yang menumpuk dapat mengganggu kesehatan masyarakat setempat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah didalam Pasal 17 yang menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mempunyai ruang lingkup” antara lain:

- a. Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf C dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Pengelola yang dibentuk masyarakat;
- b. Pemerintah Daerah dalam pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 1. Menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 2. Melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/ atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- c. Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengangkutan sampah dari sumber TPS dan/ atau TPS 3R;
- d. Dalam Pengangkutan sampah Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara dari TPS ke TPA.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan sampah pasal 17 dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pengangkutan sampah yang ada disekitar lingkungan masyarakat, selain itu Pemerintah Daerah wajib menyediakan alat pengangkutan maupun menyediakan dan TPA di masing-masing ruas jalan yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang ada didaerah karena sampah merupakan benda yang sudah tidak dipakai atau digunakan atau dibuang karena sudah tidak memiliki nilai guna lagi dan memiliki berbagai macam bau yang tidak menyenangkan dan mengganggu kesehatan jika dibiarkan terus menerus menumpuk, dan khususnya pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan mengenai pengelolaan kebersihan seperti, menyediakan alat pengangkut sampah, jadwal dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sesuai dengan yang dijadwalkan dan peyediaan TPS dan TPA jumlahnya sesuai dengan jumlah sampah yang bertumpuk disekitar masyarakat mengingat semakin bertambahnya penduduk

maka semakin besar pula jumlah sampah yang diperoleh, apalagi dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, maka dalam pelaksanaan prinsip otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dititik beratkan pada pemerintah kota atau kabupaten sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan system Desentralisasi.

Sebelum perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (STOK) besar-besaran yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga terjadinya perubahan jenis unit kerja dan perubahan nama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pelalawan, termasuk Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya mempunyai dua nama Dinas yang berbeda, yakni Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan dan Badan Lingkungan Hidup yang di gabung menjadi satu, yang sekarang menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Dinas Lingkungan Hidup melakukan beberapa Tindakan yang berbentuk program-program yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan Kebersihan antara lain:

1. Melakukan evaluasi kembali terhadap pemetaan tugas kerja kembali yang bertanggung jawab serta memaksimalkan Tenaga yang ada.
2. Melakukan Penambahan 2 armada pengangkut sampah jenis Dump Truk, 2 Unit Bak Penampung Sampah jenis Bin Konteiner yang bisa dipindah-pindahkan, jika ada Penambahan untuk armada kebersihan maka Kecamatan Pangkalan Kerinci memiliki armada kebersihan 25 Unit.
3. Melakukan Penambahan Durasi Pengangkutan Sampah ketempat pembuangan akhir (TPA).

Program-Program yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengelolaan sampah diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kecamatan

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan seperti kurangnya armada pengangkut sampah, jumlah armada yang ada dinilai tidak sebanding dengan volume sampah yang mau diangkut sehingga ini salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan sampah, disinilah membutuhkan peran dari Dinas Lingkungan Hidup dibidang pengelolaan sampah melalui program-program yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk mengatasi penumpukkan sampah yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Pemerintah Kabupaten Pelalawan harus menambah sarana dan prasarana persampahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 : Kondisi Sarana Dan Prasarana Persampahan yang ada di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

No	Merek	Jenis	Tahun	Wilayah Operasional	Ket	
					Berfungsi	Tidak Berfungsi
1	Mitsubishi 120 PS	Dump Truk	2000	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
2	Mitsubishi 100 PS	Amroll Truk	2001	Kec. Pangkalan Kerinci	-	✓
3	Mitsubishi 120 PS	Dump Truk	2000	Kec. Pangkalan Kuras	✓	-
No	Merek	Jenis	Tahun	Wilayah Operasional	Ket	
					Berfungsi	Tidak Berfungsi
4	Isuzu Elf 120 PS	Dump Truk	2003	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
5	Toyota Dina 115 ET	Dump Truk	2003	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
6	Toyota Kijang	Pick UP	2003	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
7	Toyota Dina 115 ET	Amroll Truk	2005	Kec. Pangkalan	-	✓

				Kerinci		
8	Toyota Dina 125 ET	Dump Truk	2005	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
9	Toyota Dina 125 ET	Amroll Truk	2005	Kec. Pangkalan Kerinci	-	-
10	Toyota Dina 115 ET	Dump Truk	2006	Kec. Pangkalan Kerinci	-	✓
11	Toyota Dina 115 ET	Dump Truk	2006	Kec. Ukui	✓	-
12	Toyota Dina 115 ET	Dump Truk	2006	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
13	Toyota Dina 115 ET	Dump Truk	2006	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
14	Toyota Dina 115 ET	Dump Truk	2006	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
15	Isuzu Elf 120 PS	Tangki Tinja	2007	Kec. Pangkalan Kerinci	-	✓
16	Isuzu Elf 120 PS	Dump Truk	2007	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
17	Isuzu Elf 120 PS	Dump Truk	2007	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
18	Isuzu Elf 120 PS	Dump Truk	2007	Kec. Ukui	-	✓
19	Isuzu Elf 120 PS	Dump Truk	2007	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
No	Merek	Jenis	Tahun	Wilayah Operasional	Ket	
					Berfungsi	Tidak Berfungsi
20	Toyota Hilux	Pick UP	2007	Kec. Pangkalan Kerinci	-	✓
21	Toyota Hilux	Pick UP	2012	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
22	Toyota Hilux	Pick UP	2012	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-

23	Case Super M	Becho Louder	2004	Kec. Pangkalan Kuras	✓	-
24	Komatsu D3	Buldozer	2005	Kec. Pangkalan Kuras	✓	-
25	Caterpillar 320 D	Excavator	2013	Kec. Pangkalan Kuras	✓	-
26	Toyota Dina 130 PS	Dump Truk	2013	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
27	Mitsubishi FE 74 HD	Dump Truk	2014	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
28	Mitsubishi FE 74 HD	Dump Truk	2014	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
29	Mitsubishi FE 74 HD	Dump Truk	2014	Kec. Pangkalan Kuras	✓	-
30	Mitsubishi FE 74 HD	Dump Truk	2014	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-
31	Mitsubishi FE 74 HD	Dump Truk	2014	Kec. Pangkalan Kerinci	✓	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah 2019

Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa fasilitas yang dipaparkan yaitu 20 Dump Truck yang masih berfungsi dan sarana ini berguna untuk melakukan pengangkutan sampah dari pembuangan sementara ke pembuangan terakhir, selain itu juga terdapat beberapa pick up, serta 1 buah bulldozer dan 1 eskavator yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah yang akan mengolah sampah pada tempat tersebut. Setelah Mengamati Tabel diatas dan rincian sebelumnya dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana di bidang

pengelolaan sampah masih banyak yang tidak memadai dan kekurangan alat baik untuk pengangkutan sampah maupun proses akhirnya, seperti dumptruck tidak cukup dengan 20 buah untuk mengangkut sampah secara efektif, hal ini merupakan salah satu penyebab bahwa sampah tidak bisa diangkut secara tepat waktu dan mengakibatkan sampah berserakan, tidak hanya itu bulldozer yang tersedia memang masih bisa digunakan tetapi pada sekopnya mengalami kebocoran sehingga sampah tidak semuanya bisa diangkut pada pengelolaan sampah tempat terakhir.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain sebagai berikut:

1. Pengurangan sampah dilakukan dengan cara :
 - a. Pembatasan timbunan sampah
 - b. Mengurangi produksi sampah dan konsumsi barang yang kemasannya menggunakan bahan yang tidak dapat atau sulit untuk didaur ulang
 - c. Menggunakan dan atau memanfaatkan kembali sampah secara langsung
2. Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit lima (5) jenis sampah terdiri dari :
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun
 - b. Sampah yang mudah terurai (organik)
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
3. Pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola sampah dengan memindahkan sampah dan sumber sampah sampai ke TPS sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah
4. Pengangkutan sampah oleh penyedia jasa layanan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dapat dilakukan setiap hari

5. Pengolahan sampah dilakukan dengan cara penimbunan (sanitary landfill), insernasi dan atau cara lainnya sesuai dengan jenis sampah.
6. Pemanfaatan sampah yaitu mengubah sampah menjadi material yang bernilai ekonomis
 - a. Pemanfaatan sampah dilakukan dengan cara :
 - Pengomposan
 - Daur ulang materi dan
 - Daur ulang energi
 - b. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan :
 - Metode lahan urug terkendali
 - Metode lahan urug saniter; dan
 - Teknologi ramah lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan RT dan RW dalam retribusi pemungutan iuran sampah dengan membedakan kartu seperti warna kuning untuk kepala rumah tangga dan perumahan, perkantoran dengan kartu berwarna hijau sedangkan untuk bisnis (usaha dagang) menggunakan kartu merah. Iuran yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup yang bekerja sama dengan RT dan RW berbeda pula untuk rumah dan rumah tangga dikenakan biaya Rp. 5000 perbulan, untuk perkantoran berjumlah Rp. 20000, sedangkan untuk pemilik bisnis (usaha dagang) dikenakan biaya sebesar Rp. 25000.

Untuk mewujudkan suatu lingkungan yang bersih, maka tidak akan terlepas kaitannya dengan masalah sampah yang dari hari kehari semakin menumpuk makin menumpuknya volume sampah tersebut karena adanya pertambahan penduduk yang semakin meningkat dan disertai dengan adanya aktivitas manusia yang semakin berkembang dan pembangunan yang di lakukan juga terus meningkat. Sehingga sisa atau bekas makanan dan sisa barang industri yang biasa kita kenal sebagai sampah akan bertambah banyak pula. adapun jumlah

sampah yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.3 Volume Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

No	Nama Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Timbunan Sampah Tahun 2018 (Januari - Oktober 2018)				Tidak Terlayani	
		Jumlah Penduduk	Jumlah Timbulan	Sampah Terangkut		(Ton)	(%)
		(jiwa)	Ton/ 10 bulan	Ton	%		
1	Kec. Pang. Kerinci	102.226	14,070,3	9,503,0	67,5	4,567,3	76.2
2	Kec. Pang. Kuras	52.920	2.753.2	1.650,7	60,0	1,102,5	18.3
3	Kec. Ukui	36.849	1.146.0	823,0	71,8	323,0	53.8
4	Kec. Bandar Sei Kijang	23.006	1.246,3	-	-	-	-
5	Kec. Pang. Lesung	29.035	1.246,3	-	-	-	-
Total		130.306	21.110	11.997	56.7	5.993	45.5

Sumber : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah, 2019

Dari tabel diatas, dapat diketahui Volume Sampah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan menunjukkan masih banyak timbunan sampah dan tidak terlayani.

Mekanisme pertama dari pengelolaan sampah yang perlu diperhatikan adalah pada tahap proses pembuangan sampah yang dilakukan di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota yakni Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Pengelolaan sampah 3R merupakan paradigma baru dalam pengelolaan sampah, paradigma baru tersebut ditekankan kepada metode pengurangan sampah yang

lebih arif dan ramah lingkungan. Metode tersebut lebih menekankan terhadap tingkat perilaku konsumtif dari masyarakat serta kesadaran terhadap kerusakan lingkungan akibat bahan tidak terpakai lagi yang berbentuk sampah.

Reduce atau Reduksi merupakan upaya untuk mengurangi timbunan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan, setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola hidup konsumtif yaitu perubahan kebiasaan dari yang banyak sampah menjadi hemat/ efisien dan sedikit sampah. Petugas yang bekerja untuk memungut sampah bekerja sama dengan RT setempat yakni RT menghimbau kepada seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Pangkalan Kerinci untuk meletakkan sampah didepan rumah mereka masing-masing dan jika masyarakat yang berada tidak jauh dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) agar mereka membuang sampah disana dengan begitu petugas dengan mudah dapat mengangkut sampah, kemudian selesai petugas mengangkut sampah yang ada didepan rumah masyarakat setempat petugas melakukan.

Reuse berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah seperti menggunakan botol untuk didaur ulang kembali, Sampah yang dibawa petugas dari rumah ke rumah dibawa ketempat pembuangan sampah sementara (TPST) agar dapat dipilah dan ditimbang berat sampah yang diangkut setiap armada mobil yang mengangkutnya, Pangkalan Kerinci saat ini memiliki petugas sukarelawan yaitu pemulung yang bertugas memilih sampah mana yang masih layak pakai dan tidak layak pakai. Recycle berarti mendaur ulang suatu sampah yang tidak berguna menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan

seperti mengolah bahan organik menjadi bahan kompos untuk dijadikan pupuk untuk tanaman.

Minimnya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang disediakan oleh Pemerintah mengingat yang semakin hari jumlah penduduk semakin bertambah, maka dari itu masyarakat sulit untuk menemukan tempat pembuangan sampah terdekat disekitarnya, sehingga terjadi pembuangan sampah diperkarangan yang tidak ditunggu oleh pemiliknya (tanah kosong), hal ini dikarenakan minimnya tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal Kebersihan di wilayah yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Dan keterlambatan jadwal pengambilan sampah membuat volume sampah semakin menumpuk yang menyebabkan pencemaran lingkungan, dan keterbatasan jumlah armada yang ada membuat terlambatnya jumlah pengangkutan sampah.

Dari penjelasan diatas penulis mengambil beberapa fenomena-fenomena yang terjadi. Adapun fenomena-fenomena tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Masih kurangnya Komunikasi atau Sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup mengenai pengelolaan sampah secara sederhana yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini terlihat dari masih banyaknya sampah yang ditumpuk di tepi jalan dan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti bau yang tidak sedap, dan sampah berserakan.
2. Kurangnya penyediaan tempat pengelompokan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup seperti tempat sampah atau tong sampah seauai

dengan tipe sampah yaitu organik dan non organik, selain itu juga diperlukan tempat untuk sampah yang mengandung bahan berbahaya serta beracun, serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

3. Kurangnya Sumber Daya yang berwenang dalam menangani masalah sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan, dan juga tidak tepatnya jadwal pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
4. Masih kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup seperti sarana untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, eskavator yang dalam kondisi kurang memadai sehingga sampah tidak bisa dikelola dengan baik, dan tidak adanya bak sampah yang tersedia, serta tidak tersedianya alat untuk mengelola sampah seperti alat pengelolaan sampah untuk dijadikan kompos, dan juga mesin pencacah.

Jadi yang perlu penulis tegaskan pada batasan penelitian lebih mengarahkan konsep yang berfokus pada aspek teknis dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Pelalawan khususnya di Kecamatan Kerinci, dan dengan menggunakan metode kuantitatif yang dilengkapi dengan peran serta masyarakat dan juga Dinas Lingkungan Hidup sebagai suatu keterhubungan dengan aspek teknis operasional.

Berdasarkan fenomena – fenomena diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dalam membentuk penulisan karya ilmiah

dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi masalah pokok yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci)?”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

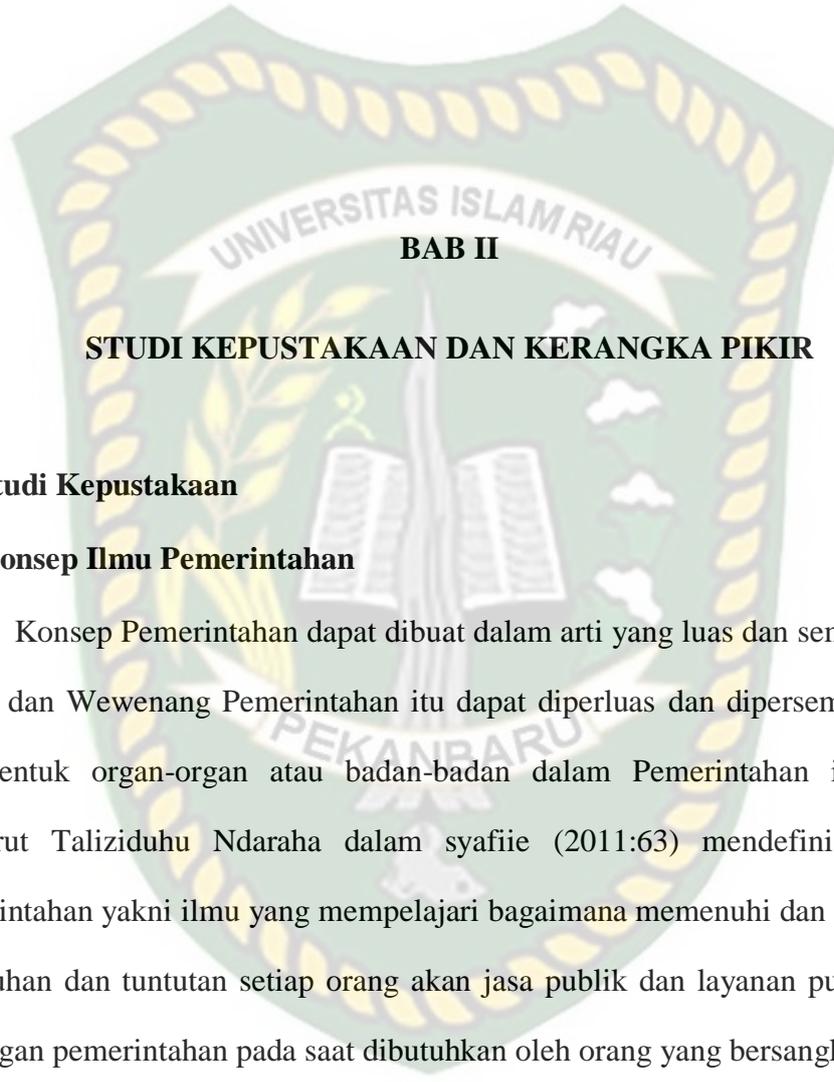
- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci).
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang Pemerintahan, khususnya dibidang Ilmu Pemerintahan.

- b. Akademis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi atau studi perbandingan bagi kawan-kawan yang akan melakukan penelitian di Fakultas ilmu sosial dan politik universitas islam riau terkait dengan judul penelitian yang sama, yaitu pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah.
- c. Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pihak Dinas Lingkungan Hidup, peneliti mengharapkan semoga penelitian ini menjadi salah satu acuan dalam melaksanakan tugas serta kewajiban sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab untuk kebersihan kota khususnya Kabupaten Pelalawan





BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Konsep Pemerintahan dapat dibuat dalam arti yang luas dan sempit artinya Tugas dan Wewenang Pemerintahan itu dapat diperluas dan dipersempit dengan membentuk organ-organ atau badan-badan dalam Pemerintahan itu sendiri. Menurut Taliziduhu Ndaraha dalam syafiie (2011:63) mendefinisikan ilmu pemerintahan yakni ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan publik dalam hubungan pemerintahan pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.

Menurut pendapat Musanef (dalam syafiie 2011:7) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta meyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Kemudian menurut C.F.Strong (dalam syafiie 2011:22) ilmu pemerintahan mempunyai arti luas yaitu kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara kedalam dan keluar. Oleh karena itu yang pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-Undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan Masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Selanjutnya menurut Ndraha (2005:36) Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan Pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan menurut Rasyid (1997:11) adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Untuk mengemban tugas negara tersebut, Menurut Ndraha (2000:78-79) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (fungsi pelayanan)

yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi.

2. Fungsi sekunder (fungsi pemberdayaan)
yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimaksud daerah adalah masyarakat hukum (yang ditentukan batas-batasnya), dan yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan otonomi luas, daerah diharapkan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan khususnya serta potensi dan keanekaragaman.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 208, Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah, kemudian dalam pasal 209 perangkat daerah terdiri dari :

1. Perangkat daerah Provinsi terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Secretariat DPRD
 - c. Inspektorat
 - d. Dinas, dan
 - e. Badan
2. Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
 - c. Inspektorat
 - d. Dinas, dan
 - e. kecamatan

Kedudukan kecamatan dijelaskan pada Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- a. Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
- b. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- c. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota disampaikan kepada menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat untuk mendapatkan persetujuan.

3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Mengutip pendapatnya Suryadinata (Dalam Rijalul 2015: 27-28), Manajemen diartikan sebagai “ kemampuan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan manusia dan berbagai

sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara seefisien mungkin”.

Mengenai manajemen secara umum yaitu:

- a. Terdapatnya tujuan yang hendak dicapai;
- b. Adanya sekelompok orang yang menggunakan orang lain;
- c. adanya sumber-sumber yang digunakan dalam pencapaian tujuan;
- d. adanya manajemen yang bersifat seni dan ilmu;

Menurut Stoner dan Freeman, (dalam Danang 2012:2) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut geogre terry (dalam syafiie 2013:126) berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang khusus yang terdiri dari suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukanserta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang lainnya.

Suryadinata (dalam Rijalul 2015:27-28), mengemukakan “pemerintah yang merupakan proses kegiatan pemerintah dalam pelaksanaannya memerlukan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada usaha bagi kraswastaepentingan pemerintah dan kepentingan rakyat wiraswata. Manajemen pemerintahan merupakan proses kegiatan pemerintah secara umum berkaitan dengan usaha-usaha menjalankan kekuasaan pemerintah dalam Negara dan mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen”. Sebagai proses untuk mencapai tujuan melalui kepemimpinan, pemberian bimbingan, motivasi, pengaturan dan pengendalian, maka manajemen mengandung fungsi-fungsi antara lain:

- a. fungsi perencanaan (planning)
- b. fungsi pengorganisasian (organizing)
- c. fungsi pengerakkan (actuating)
- d. fungsi pengawasan dan pengendalian (Controlling).

4. Konsep Lingkungan Hidup

Istilah Lingkungan dan Lingkungan Hidup atau Lingkungan Hidup Manusia sebagai terjemahan dari Bahasa Inggris “Environment and Human Environment”, seringkali digunakan secara silih berganti dalam pengertian yang sama. Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang berada di bumi, yang terdiri dari komponen biotik maupun abiotik. Lingkungan hidup abiotik terdiri dari tanah, air, udara dan matahari. Adapun yang dimaksud Lingkungan Hidup biotik yaitu terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia.

Lingkungan hidup yang berkualitas hanya dapat tercipta apabila manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kelebihan dari makhluk hidup lainnya dapat menjaga dan mengelolanya dengan baik. Pengelolaan dan penjagaan tersebut dapat dilakukan apabila manusia memiliki kesadaran akan pentingnya Lingkungan Hidup sebagai penyeimbang kehidupan.

Masalah Lingkungan di Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, berbeda dengan masalah Lingkungan di Negara maju atau industri. Masalah Lingkungan di Negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat sampingan yang menggunakan banyak energi, Teknologi maju yang boros energi pada industri, kegiatan transportasi dan komunikasi serta kegiatan ekonomi lainnya. Masalah Lingkungan di Indonesia terutama berakar pada keterbelakangan pembangunan, selain itu juga masalah pengelolaan sumber daya alam dan juga akibat tekanan kepadatan penduduk yang disertai dengan

masalah kemiskinan telah mendorong penduduk di beberapa bagian dari wilayah yang tidak sadar akan pentingnya menjaga Lingkungan Hidup.

5. Konsep Kebijakan

Menurut Ndraha (2003:492-499) kebijakan berasal dari terjemahan kata policy, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi actor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat.

Menurut Ndraha (2011:498) mendefinisikan kebijakan adalah pemerintahan sebagai pilihan terbaik usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral, diarahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan.

Wibawa (2011:3) kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada para pelaksana yang menjelaskan cara cara mencapai suatu tujuan.

Menurut Nugroho (2004:100) kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: pertama dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan), kedua bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan ketiga bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi.

Masih Nugroho (2004) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan pribadi atau

golongan melainkan semua masalah yang menyangkut bersama dan sejumlah masyarakat di daerah.

Menurut Bogue dan Saunders (dalam Syafaruddin 2008:76) menyimpulkan kebijakan adalah menjelaskan sasaran umum organisasi yang berisikan alasan bagi eksistensi dan menyediakan arah pembuatan keputusan bagi pencapaian sasaran.

Menurut Eystone (dalam Winarno, 2007:17) mengatakan bahwa kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu unit pemerintah dengan lingkungan, konsep yang ditawarkan Eystone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan diterapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman. Pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi (Pasalog, 2008:92).

Menurut Dye dalam Agustino (2008:7) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan. Rose dalam Agustino (2008:7) kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Sedangkan Kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Permasalahan dalam masyarakat yang perlu ditangani adalah sangat luas meliputi berbagai bidang dan sektor kehidupan. Maka diperlukan berbagai kebijakan publik yang sesuai dan terarah agar supaya tujuannya berhasil dicapai secara efektif dan efisien (Adisasmita, 2011:113).

6. Konsep Implementasi Kebijakan

6.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan atau langkah tindakan, didalamnya terdapat proses yang divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu. Dunn (2003:22) membagi proses pembuatan kebijakan dalam 5 (lima) tahapan, yakni :

1. Penyusunan agenda kebijakan.
2. Formulasi kebijakan.
3. Adopsi kebijakan.
4. Implementasi kebijakan.
5. Penilaian kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (2008:54) merumuskan proses implementasi ini sebagai *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983:55), menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: “Memahami apa yang senyatanya

terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian”.

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran (*target group*), melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended/negative effects*). Dengan demikian implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (2008:152) menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut dua karakteristik yang berbeda, yakni: jumlah perubahan yang terjadi menurut dua karakteristik yang berbeda, yakni: jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemeran serta dalam proses

implementasi berlangsung. Unsur perubahan pertama merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:

1. Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif dari pada perubahan-perubahan drastis (rasional). Perubahan inkremental pada dasarnya merupakan *remedial* dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidaksempurnaan sosial dimasa depan.
2. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Ada yang menyarankan bahwa implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan reorganisasi secara drastis. Pandangan ini didukung oleh pendapat yang mengatakan bahwa kegagalan program-program sosial banya berasal dari meningkatnya tuntutan-tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur adiminstrasi yang ada. Kebijakan yang menetapkan perubahan-perubahan dalam hubungannya dengan pemeran serta yang terlibat dalam proses implementasi akan lebih sulit dilaksanakan dari pada dalam hubungan-hubungan yang mantap.

6.2 Faktor Penghambat dan Pendukung yang Mempengaruhi Wajib Pajak

Kebijakan apapun bentuknya sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hoogwood dan Gunn (1993:131) membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ke dalam dua kategori yaitu tidak terimplementasikan (*non*

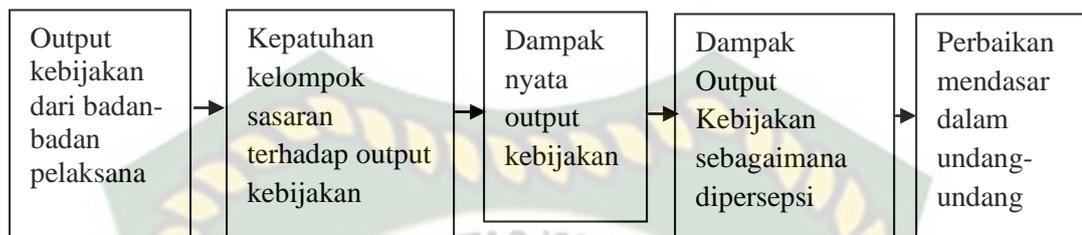
implementation) dan implementasi yang tidak berhasil (*unsuccessful implementation*). Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau berkerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau permasalahan yang dibuat di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya implementasi yang efektif sukar dipenuhi.

Memahami faktor yang mempengaruhi wajib pajak sebagai tahapan suatu kebijakan haruslah mengetahui proses yang dikatakan sebagai implementasi, karena terdapat mekanisme-mekanisme yang harus dilakukan untuk menyatakan proses implementasi suatu kebijakan sudah dijalani. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier sebagai grand teori untuk melandasi tentang tahap-tahap dalam proses implementasi suatu kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier (1983:55), menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa, Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian.

Tahapan-tahapan dari proses implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.I Tahap-Tahap dalam Proses Menaati Wajib Pajak



Sumber: D.A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, 1983:22 (Subarsono 2008:95).

Memahami tahap-tahap yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier di atas, peneliti menguraikan dalam kerangka yang mudah dipahami dalam proses implementasi yakni menjadi;

1. Tahap output kebijakan
2. Tahap kepatuhan kelompok sasaran
3. Tahap dampak nyata kebijakan
4. Tahap kesesuaian dengan persepsi

Implementasi yang tidak berhasil terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa penggantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya), kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri jelek (*bad policy*) atau kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck* (2001:57).

Hogwood dan Gunn (1984) menyatakan bahwa: untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa kondisi atau persyaratan tertentu sebagai berikut:

1. *The circumstances external to the implementing agency do not impose crippling constraints;*(kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius)
2. *That adequate time and sufficient resources are made available to the programme;*(untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai)
3. *That the required combination of resources is actually available;*(perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia);
4. *That the policy to be implemented is based upon a valid theory of cause and effect;*(kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal)
5. *That the relationship between cause and effect is direct and that there are few, if any, intervening links* (hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya)
6. *That dependency relationships are minimal* (hubungan saling ketergantungan harus kecil;
7. *That there is understanding of, and agreement on, objectives;* (pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan)
8. *That tasks are fully specified in correct sequences;*(tugas-tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat);
9. *That there is perfect communication and co-ordination* (komunikasi dari koordinasi yang sempurna);
10. *That those in authority can demand and obtain perfect compliance* (pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapat kepatuhan yang sempurna)

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi (2008 90-92)

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran

(*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah

adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau *SOP*). *SOP* menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

6.3 Landasan dan Mutu Implementasi

Menurut Islamy (2001:65), untuk bisa melihat apakah proses implementasi telah berjalan dengan baik, maka ada seperangkat kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Apakah strategi/pendekatan implementasi telah diidentifikasi, dipilih dan dirumuskan dengan jelas?
2. Apakah unit pelaksana teknis telah disiapkan?
3. Apakah aktor-aktor utama (*policy subsystems*) telah ditetapkan dan siap menerima tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut?
4. Apakah prosedur operasi baku telah ada, jelas, dan difahami oleh pelaksana kebijakan?
5. Apakah koordinasi pelaksanaan telah dilakukan dengan baik?
6. Bagaimana, kapan, dan kepada siapa alokasi sumber-sumber hendak dilaksanakan?
7. Apakah hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab telah diberikan dan difahami serta dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan?
8. Apakah pelaksanaan kebijakan telah dikaitkan dengan rencana tujuan dan sasaran kebijakan?
9. Apakah teknik pengukuran dan kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan telah ada, jelas, dan diterapkan dengan baik?
10. Apakah penilaian kinerja kebijakan telah menerapkan prinsip-prinsip efisiensi ekonomi dan politis serta sosial?

Sebagaimana telah dikatakan bahwa sekali usulan kebijakan telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang maka keputusan kebijakan itu telah siap

untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Pada bagian lain, Lineberry (1978:45) menyatakan bahwa proses implementasi setidaknya-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut yaitu

1. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana,
2. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (*standard operating procedures*),
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan di antara badan-badan pelaksana,
4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Namun demikian perlu dipahami bahwa pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada jajaran birokrasi, tetapi juga melibatkan aktor-aktor di luar birokrasi pemerintah, seperti organisasi kemasyarakatan, bahkan individu juga sebagai pelaksana kebijakan.

Dengan demikian maka implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Grindle dalam Wirawan (2012:45) mengatakan implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah

konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan, oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijaksanaan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan.

Menurut Wibawa (1992:14) Implementasi kebijakan merupakan pengetahuan keputusan mengenai yang mendasar, biasanya tertuang dalam satu Undang-Undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan (tersebut) menjelaskan masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dalam berbagai “menggunakan struktur” proses implementasi tersebut.

Menurut Nurdin Usman (2002:70) berpendapat bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Model implementasi kebijakan yang bersifat top down dikembangkan oleh Edward III dalam Leo (2008:149) yang menamakan implementasi kebijakan public dengan *Directy and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diimplementasikan oleh Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan suatu kebijakanyaitu :

- a. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran tidak jelas maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

- b. Sumber Daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kurang sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya financial. Sumber daya adalah factor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif.
- c. Disposisi/sikap, disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor mempunyai disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuatan kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dan aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang menajadi standar.

7. Konsep Pengelolaan

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1982:124) mendefinisikan pengertian pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

8. Konsep Sampah

Menurut Definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Selanjutnya pengertian yang sama tentang sampah menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia sampah adalah suatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang berasal dari aktivitas manusia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, pada pasal 14 mengenai Penanganan Sampah yang berbunyi :

Penanganan sampah meliputi kegiatan :

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan
- c. Pengangkutan
- d. Pengolahan
- e. Pemrosesan akhir sampah

Berdasarkan pernyataan diatas maka Peneliti menarik kesimpulan mengenai Penanganan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2015, maka indikatornya yaitu;

- a. Pemilahan
- b. Pengumpulan
- c. Pengangkutan
- d. Pengolahan; dan
- e. Pemrosesan akhir.

Alasan peneliti menggunakan Teori Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 yaitu dikarenakan Masih kurangnya pelaksanaann pemilahan , pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini terlihat dari tidak adanya penyedia tempat pengelompokan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup yang paling sedikit 5 jenis sampah yang terdiri dari atas sampah yang mengandung bahan berbahaya serta beracun, serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai (organik), sampah yang dapat digunakan kembali, sapah yang dapat didaur ulang dan sampah lainnya.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu terkait Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

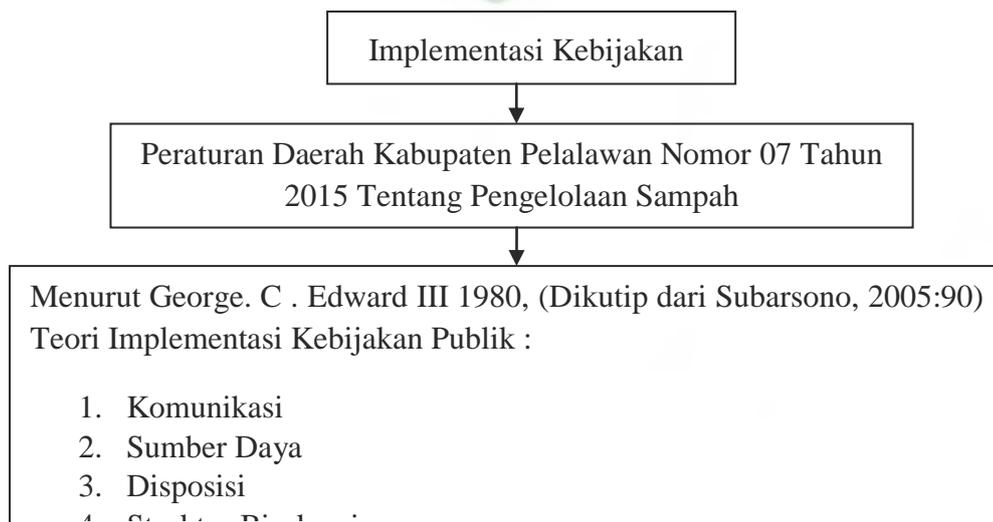
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Yudi Anugerah Purwadi	Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah)	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi Penelitian di Kota Pekanbaru - Metode Penelitian Kuantitatif 	menggunakan teori Edward III : -Komunikasi -Sumber Daya -Disposisi -Struktur Birokrasi
2.	Julia Hasanah	Peranan Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	Menggunakan teori Perda Nomor 7 Tahun 2015 : <ul style="list-style-type: none"> - Penampungan Sampah - Pengumpulan sampah - Pembungangan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi Penelitian di kecamatan pangkalan kerinci - Metode Penelitian Kuantitatif

3.	Moh. Rizal	Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala)	Menggunakan teori Perda Nomor 7 Tahun 2015 : <ul style="list-style-type: none"> - Penampungan Sampah - Pengumpulan sampah - Pembungangan sampah - Lokasi Penelitian di kelurahan Boya kecamatan Banawa 	- Metode Penelitian Kualitatif
----	------------	--	--	--------------------------------

Berdasarkan tabel Penelitian Terdahulu diatas banyak perbedaan yang mendasar mengenai penelitian yang akan penulis kaji atau teliti yaitu mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci), maka penulis membandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat perbedaan seperti tahun penelitian jauh perbedaannya, kemudian banyaknya perbedaan-perbedaan pada fenomena penelitian, begitu juga berbedanya tujuan penelitian dan kegunaan penelitian tersebut, studi kepustakaan yang banyak mengambil teori dan kerangka pikiran yang berbeda, perbedaan pada penulisan operasional variabel, populasi dan sampel yang berbeda.

C. Kerangka Pikiran

Gambar II.1 : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci)





Sumber: Modifikasi penelitian 2019

D. Konsep Operasional

Konsep Operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan merupakan pengetahuan keputusan mengenai yang mendasar, biasanya tertuang dalam satu Undang-Undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan.
2. Kebijakan adalah Pemerintahan sebagai pilihan terbaik usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral, diarahkan

guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan.

3. Manajemen pemerintahan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan Republik Indonesia tahun 1945.
5. Ilmu Pemerintahan adalah mendefinisikan ilmu pemerintahan yakni ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan publik dalam hubungan pemerintahan pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.
6. Sampah adalah suatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang berasal dari aktivitas manusia. selain itu sampah juga sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) tetapi bukan biologis karena kotoran manusia (*human waste*) tidak termasuk kedalamnya.
7. Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas-aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa efektif dan efisien.

8. Pengawasan ialah tindakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah yang dikhususkan untuk seksi pengawasan terhadap pengelolaan sampah untuk melakukan tugas mengawasi bidang di bagian kebersihan dalam pengelolaan sampah.
9. Pemilihan sampah dilakukan oleh setiap orang yang berada pada pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dan wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci)

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Pengukuran
1	2	3	4	5

Nurdin Usman (2002:70) berpendapat bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.	Implementasi Kebijakan tentang pengelolaan sampah	1. Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah b. Melakukan Koordinasi kepada pemerintahan di masing-masing daerah terkait pengelolaan sampah c. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait cara pengelolaan sampah 	Nominal
		2. Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> a. Kecukupan personil atau sumber daya manusia dalam menangani pengelolaan sampah b. Kecukupan Fasilitas sarana dan prasarana dalam melaksanakan pengelolaan sampah c. Tersedianya anggaran terkait dalam pelaksanaan pengelolaan sampah 	Nominal
Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	pengukuran
1	2	3	4	5

Nurdin Usman (2002:70) berpendapat bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.	Implementasi Kebijakan tentang pengelolaan sampah	3. Disposisi	a. Pemahaman dan Pengetahuan dari SDM terkait pengelolaan sampah b. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terkait pelaksanaan pengelolaan sampah c. Adanya komitmen dari Pemerintahan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah	Nominal
		4. Struktur Birokrasi	a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pengelolaan sampah b. Adanya unit kerja khusus dibidang pengelolaan sampah c. Upaya tindakan tegas dalam melaksanakan pengelolaan sampah	Nominal

Sumber :Modifikasi Penelitian Tahun 2019

F. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap pelaksanaan variable dan indikator dalam penelitian ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) kategori yaitu Terimplementasi, Cukup Terimplementasi, Kurang Terimplementasi.

Untuk menguraikan analisa data, uraikan dari masing-masing pengukuran tersebut sebagai berikut:

Terimplementasi : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan

Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah
Mencapai (67%-100%)

Cukup Terimplementasi : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan
Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah
Mencapai (34%-66%)

Kurang Terimplementasi : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan
Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah
Mencapai (0%-33%)

a. Komunikasi (*Communication*)

Terimplementasi : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Komunikasi (*Communication*) Berada Pada Skala
Penilaian Di Angka (67%-100%)

Cukup Terimplementasi : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Komunikasi (*Communication*) Berada Pada Skala
Penilaian Di Angka (34%-66%)

Kurang Terimplementasi : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Komunikasi (*Communication*) Berada Pada Skala
Penilaian Di Angka (1%-33%)

b. Sumber Daya (*Resources*)

Terimplementasi : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Sumber Daya (*Resources*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100%)

Cukup Terimplementasi : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Sumber Daya (*Resources*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66%)

Kurang Terimplementasi : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Sumber Daya (*Resources*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (1%-33%)

c. Disposisi (*Disposition*)

Terimplementasi : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Disposisi (*Disposition*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100%)

Cukup Terimplementasi : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Disposisi (*Disposition*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66%)

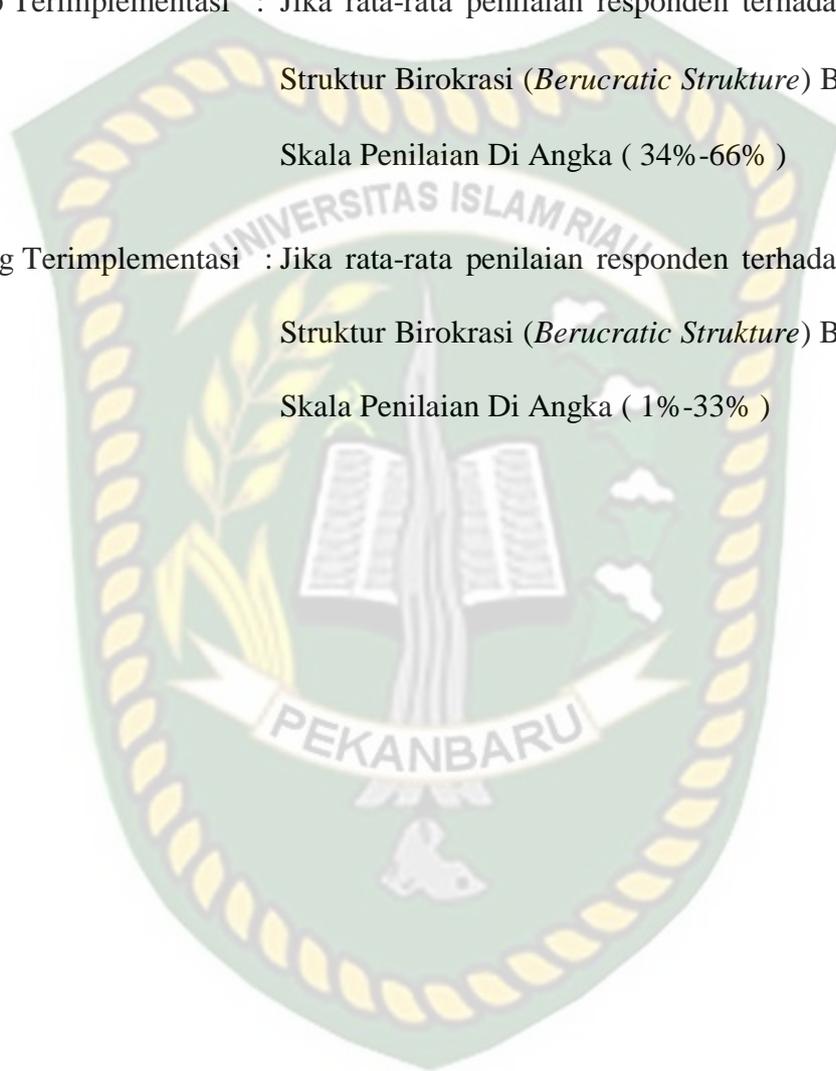
Kurang Terimplementasi : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Disposisi (*Disposition*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (1%-33%)

d. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Terimplementasi : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Struktur Birokrasi (*Berucratic Strukture*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100%)

Cukup Terimplementasi : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Struktur Birokrasi (*Berucratic Strukture*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66%)

Kurang Terimplementasi : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Struktur Birokrasi (*Berucratic Strukture*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (1%-33%)





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Survey Deskriptif yang dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala dan permasalahan. Kemudian penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif yaitu menerangkan dan menguraikan serta menganalisa data yang diperoleh terhadap fenomena-fenomena mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci).

Penelitian deskriptif adalah uraian sistematis tentang teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang di teliti. (Sugiono, 2016;63).

Kemudian metode penelitian ini adalah metodologi kuantitatif. menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menurut Sugiyono (2012 : 16) proses penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bersifat linear, dimana

langkah-langkahnya jelas, mulai dari rumusan masalah, berteori, berhipotesis, mengumpulkan data, analisis data dan membuat kesimpulan dan saran. Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada penggunaan angka-angka yang membuatnya lebih mendetail dan jelas, selain itu penggunaan tabel, grafik dan juga diagram.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Alasan pemilihan judul ini adalah Karena di Kecamatan Pangkalan Kerinci masih banyak terdapat permasalahan yang berkaitan dengan sampah yang masih ditemukan di pinggir jalan maupun belum banyak nya tempat pembuangan sampah sementara (TPS), dan permasalahan lainnya yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah yang kurang terlaksana dengan baik khususnya mengenai pengelolaan sampah.

Dan juga Masih kurangnya sarana yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup seperti sarana tong sampah sesuai dengan tipe yaitu terdapat 5 tipe sampah yang terdiri dari atas sampah yang mengandung bahan berbahaya serta beracun, serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai (organik), sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang dan sampah lainnya sampah yang dilakukan oleh masyarakat, serta tidak tertibnya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan, hal ini terlihat tidak tepatnya jadwal pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, selanjutnya sampel yaitu bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. (Sugiyono, 2012:80).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2011:91).

Untuk mengetahui lebih jelasnya perincian populasi dan sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.I : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1	1	100%
2	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah	1	1	100%
3	Petugas Kebersihan	210	10	4,7 %
4	Masyarakat	102.226	20	0.027%
Jumlah		102.438	32	0.04%

Sumber Data :Modifikasi Penelitian Tahun 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2011;91).

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Kepala Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, digunakan teknik sampling jenuh yang istilah lain adalah sensus, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
- b. Untuk tugas kebersihan penulis menggunakan penarikan sampel menggunakan Purposive Sampling, Metode *Purposive Sampling* adalah penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang kasus tawuran antar pelajar, maka peneliti akan mencari pelajar yang memiliki kriteria yang sesuai dengan kasus di atas yaitu mencari mahasiswa yang dianggap bandel dan sering melakukan tawuran.
- c. Untuk Masyarakat digunakan teknik penulis menggunakan penarikan sampel menggunakan *accidental sampling*. *Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan

sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

E. Jenis Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi yaitu dari data penelitian tentang Peranan Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dan diperlukan untuk mengumpulkan data yang sudah berupa dokumen atau catatan yang meliputi :

- a. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah
- b. Tugas dan Fungsi setiap bidang-bidang yang bersangkutan yang diperoleh dari Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah Kabupaten Pelalawan
- c. Data-Data yang lain menurut Penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik berikut:

1. Observasi

Menurut Husaini Usman (2009:52). Teknik Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara dating, pendekatan, dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah Kabupaten Pelalawan.

2. Kuisisioner

Kuisisioner yaitu membuat dan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden mengenai permasalahan dalam penelitian. Dalam hal ini memberikan lembaran pertanyaan kepada Pegawai-Pegawai Di Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Sampah guna untuk mendapatkan informasi tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci)

3. Wawancara (interview)

Menurut Riduwan (2009:29) “ wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya”. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya-jawab kepada pihak-pihak terkait dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Kecamatan Pangkalan Kerinci)

4. Dokumentasi

karena terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera dan terletak lebih kurang 75 Km dari Pusat Ibukota Provinsi Riau. Kecamatan Pangkalan Kerinci dibentuk berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2001, dengan Wilayah terletak 25 M di atas permukaan laut, dengan Suhu Maksimum 33°C dan Suhu Minimum 30°C. Kecamatan Pangkalan Kerinci terbagi atas 3 Kelurahan meliputi Kelurahan Kerinci Barat, Kelurahan Kerinci Kota dan Kelurahan Kerinci Timur, selain itu juga terdiri dari 4 Desa yaitu desa Bukit Agung, desa Kuala Terusan, desa Makmur dan desa Rantau Baru.

Luas wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan kurang lebih 35.056,8 Ha. Wilayah dengan luas tersebut di bagi atas beberapa wilayah seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel IV.1: Pembagian Luas Wilayah

No.	Jenis Wilayah	Luas Wilayah (Ha)
1.	Tanah Kering	4.151
2.	Tanah Basah	6.455
3.	Tanah Hutan	18.286
4.	Tanah Perkebunan	5.135
5.	Tanah Keperluan Fasilitas Sosial	13,3
6.	Lain-lain (Tanah Tandus)	1026,5
Jumlah		35.066,8

Sumber: Data Statistik Kantor Kecamatan Pangkalan Kerinci

Kecamatan Pangkalan Kerinci ini berbatasan dengan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan, yaitu, Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Seikijang, Kecamatan Kerinci Kanan dan Kabupaten Siak, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kuras, Sebelah Barat

berbatasan dengan Kecamatan Langgam dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pelalawan.

B. Keadaan Umum Kecamatan Pangkalan Kerinci

a. Keadaan Demografis

Penduduk merupakan salah satu unsur penting pada suatu wilayah dalam menunjang perkembangan daerah tertentu, karena penduduk secara langsung mempengaruhi pertumbuhan pembangunan suatu daerah, karena semakin meningkat populasi penduduk suatu daerah akan diikuti dengan pertumbuhan pembangunan pada daerah tersebut. Berdasarkan data statistik kependudukan Kecamatan Pangkalan Kerinci diterangkan bahwa jumlah penduduk yang berada di wilayah ini berjumlah 84.865 Jiwa dengan tingkat kepadatan penduduknya 1433 Jiwa/km². Adapun Jumlah penduduk yang terbagi sesuai jenis kelamin seperti tabel di bawah ini:

Tabel IV.2: Pembagian Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-Laki	49.442
2.	Perempuan	35.423
Jumlah		84.865

Sumber: Data Statistik Kantor Kecamatan Pangkalan Kerinci

Dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci memiliki jumlah penduduk yang digolongkan menurut jenis kelamin yang terdiri atas 49.442 jiwa Penduduk laki – laki dan 35.423 jiwa penduduk perempuan. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu berjumlah 49.442 jiwa.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah, apabila semakin pesat perkembangan pendidikan suatu daerah maka semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dapat menunjang pertumbuhan pembangunan daerah itu. Kualitas pendidikan ini akan membaik apabila pemerintah setempat menyediakan fasilitas pendidikan yang baik pula sesuai kebutuhan masyarakat. Berikut pembagian penduduk menurut jenjang pendidikan yang di klasifikasikan dalam tabel berikut:

Tabel IV.3: Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Penduduk Berdasarkan Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Belum Sekolah	7.519
2	Tidak Tamat Sekolah Dasar	4.995
3	Tamat SD/Sederajat	4.327
4	Tamat SLTP/sederajat	9.228
5	Tamat SLTA/sederajat	35.382
6	Tamat Akademi/sederajat	10.974
7	Tamat Perguruan Tinggi/sederajat	8.955
8	Buta Huruf	3.485
Jumlah		84.865

Sumber: Data Statistik Kecamatan Pangkalan Kerinci

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikan penduduk yang terbanyak adalah penduduk yang tamat SLTA/sederajat yaitu sebanyak 35382 jiwa, Ini menunjukkan bahwa tingkat 17 pendidikan penduduk di Kecamatan Pangkalan Kerinci tergolong cukup baik.

c. Agama

Selain dalam Bidang Pendidikan faktor yang menunjang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia suatu daerah juga di dukung oleh faktor moralitas masing – masing individu daerah tersebut. Tentunya faktor ini berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan yang dianut individu itu sendiri. Menurut data yang bersumber dari Kantor Kecamatan Pangkalan Kerinci ini, Penduduk wilayah ini mayoritas beragama Islam. Tetapi selain itu, di daerah ini juga berkembang agama yang lain yaitu meliputi Khatolik, Protestan, Hindu dan Budha. berikut Jumlah Penduduk yang digolongkan berdasarkan agama yang dianut sesuai data pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.4: Pembagian Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Islam	68.842
2	Khatolik	4.403
3	Protestan	10.700
4	Hindu	280
5	Budha	640
Jumlah		84.865

Sumber: Data Statistik Kecamatan Pangkalan Kerinci

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk yang beragama Islam sangat dominan di wilayah ini yaitu berjumlah 68.842 jiwa. Agama yang beragam tidak membuat antar masyarakat saling bertikai dalam urusan 18 agama, mereka tetap bisa saling menghargai dan menghormati terbukti dengan lancarnya segala kegiatan beragama yang dilaksanakan di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ini tanpa adanya gangguan dari pemeluk agama lain.

C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan

Sebagai Kabupaten baru pada saat 1999 yang merupakan hasil pemekaran, maka instansi pemerintahan yang ada masih mengikuti instansi pada Kabupaten induk yaitu Kabupaten Kampar. Instansi yang menangani lingkungan hidup pada masa baru pemekaran bernama Badan Penanggulangan Dampak Daerah (Bapedalda). Pada tahun 2002 dibentuk SOTK baru dan Bapedalda berganti nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup dengan memiliki bidang.

1. Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan analisa terhadap pernyataan politik Bupati dan Wakil Bupati semasa kampanye pilkada, kemudian kondisi umum dan masalah pembangunan serta isu-isu strategis Kabupaten Pelalawan saat ini yang menjadi tantangan tiga tahun kedepan, dengan memperhitungkan sumber daya sebagai modal dasar yang dimiliki. Maka visi pembangunan RPJMD Kabupaten Tahun 2011-2016: “Pembaharuan Menuju Kemandirian Pemerintah dan Masyarakat.

Visi Dinas Lingkungan Hidup, adalah: “menjadikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan sebagai fasilitator dan motifator perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang professional guna mewujudkan Kabupaten Pelalawan sebagai Kabupaten terdepan dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan pada tahun 2030.

2. Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan

Dalam usaha pencapaian visi tersebut di atas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima bidang lingkungan hidup bagi masyarakat

2. Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
3. Menjadikan masyarakat dan pelaku usaha sebagai ujung tombak dalam upaya mewujudkan Kabupaten Pelalawan sebagai Kabupaten terdepan dalam pengelolaan lingkungan
4. Melakukan upaya pengawasan (*controlling*) terhadap dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan
5. Mewujudkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Undang-undang lingkungan hidup guna tercapainya pembangunan yang berwawasan lingkungan

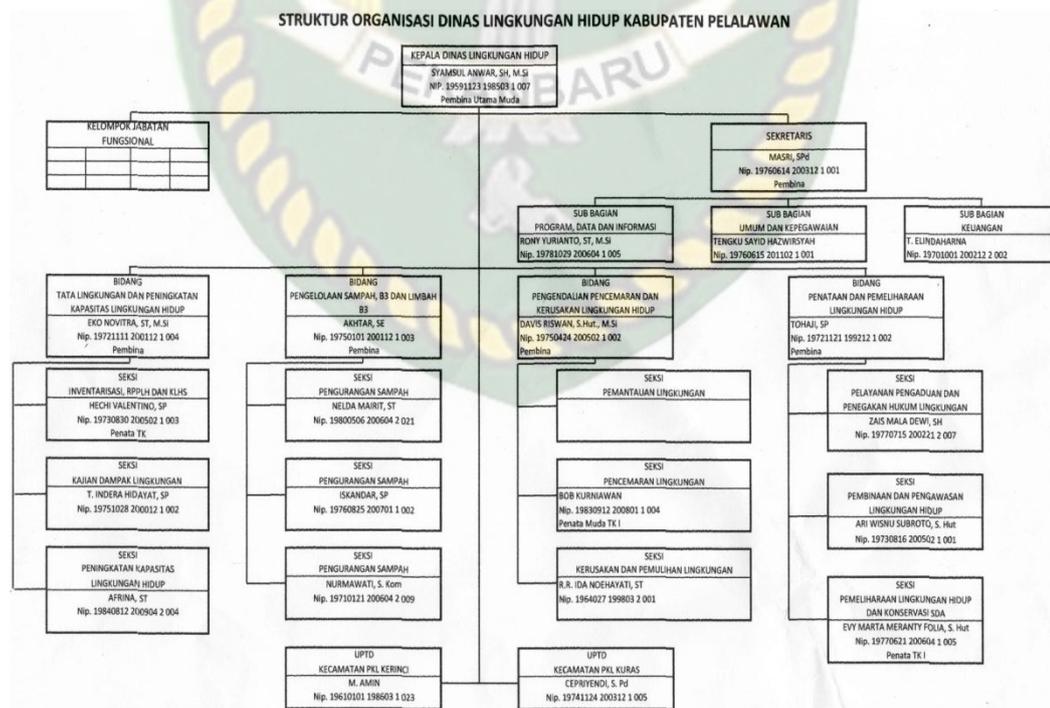
3. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan Desentralisasi, Dekonsentrasi, tugas pembantuan, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah/Bupati. Adapun rincian tugasnya:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang lingkungan hidup
2. Pengkajian, perumusan, penyusunan kebijakan teknis daerah dibidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pengkoordinasian Kegiatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup.
4. Penguatan dan pemfasilitasian kegiatan masyarakat dan pemerintah di daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan, sumberdaya manusia, peran serta seluruh mitra lingkungan dalam penegndalian dampak lingkungan dan peningkatan secara sukarela perangkat manajemen serta alternative teknologi yang berorientasi ramah lingkungan.

6. Pengembangan sistem dan layanan data dan informasi serta hubungan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan.
7. Perencanaan, pengembangan dan pembangunan jejaring kerja dengan berbagai mitra lingkungan untuk meningkatkan kepedulian lingkungan melalui pendidikan pelatihan lingkungan hidup.
8. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diderah.
9. Pengembangan kesiapsiagaan dan tanggap darurat terhadap bencana lingkungan, sarana pengendalian dampak lingkungan hidup dan sumber daya di bidang pengendalian dampak lingkungan.
10. Pengendalian kualitas lingkungan hidup di daerah dengan melaksanakan pemantauan, pemeriksaan, pembimbingan dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku.
11. Pemantauan, pemeriksaan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan ketentuan yang berlaku.
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelelawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci), jadi data-data yang di dapat dalam penelitian ini bersumber dari Petugas Kebersihan berjumlah 10 orang responden dan Masyarakat berjumlah 20 orang responden dengan cara penyebaran kuesioner, serta penulis juga melakukan wawancara dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup yaitu bagian Kabid Pengelolaan Sampah.

Sehubungan dengan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelelawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci), maka penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan Pendidikan. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang identitas responden.

I. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelelawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci), serta dengan cara penyebaran kuisisioner, maka identitas

responden penelitian yang digunakan berdasarkan jenis kelamin adalah berikut ini:

Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Petugas Kebersihan

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	6	60%
2	Perempuan	4	40%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian di lapangan, 2019

Dari tabel V.1 di atas dapat dilihat bahwa responden petugas kebersihan yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelelawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci) adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 6 orang (60%), dan jumlah responden petugas kebersihan perempuan berjumlah 4 orang (40%) dari total keseluruhan 10 Orang responden yang berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelelawan.

Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	15	75%
2	Perempuan	5	25%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.2 di atas dapat dilihat bahwa responden masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten Pelelawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci) adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 15 orang (75%), dan jumlah responden masyarakat perempuan berjumlah 5 orang (25%) dari total keseluruhan 20 Orang responden yang berada di Pangkalan Kerinci.

2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Dari hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelelawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci), serta dengan cara penyebaran kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang usia berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel V.3 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Petugas Kebersihan

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	3	30%
2	31-40 Tahun	7	70%
3	41-50 Tahun	0	0%
4	>50 Tahun	0	0%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.3 di atas dinyatakan bahwa responden dari Petugas Kebersihan, baik dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, responden yang paling banyak usia 31-40 Tahun sebanyak 7 orang (70%) dan usia pada 20-30 Tahun yang berjumlah 3 orang (30%). Hal ini dapat di simpulkan bahwa yang paling

banyak jumlah responden yang memiliki umur dalam penelitian ini adalah umur 31-40 Tahun, karna jika dilihat dari usia tersebut mereka memiliki kematangan dan tingkat konsistensi yang baik dalam melakukan pekerjaannya dan tentu sudah memiliki pengalaman yang bagus dalam bidangnya.

Tabel V.4 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	5	25%
2	31-40 Tahun	10	50%
3	41-50 Tahun	5	25%
4	>50 Tahun	0	0%
Jumlah		20	100 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.4 di atas dinyatakan bahwa responden dari masyarakat yang berada di Kabupaten Pelalawan, baik dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, responden yang paling banyak berada pada usia 31-40 Tahun sebanyak 10 orang (50%) dan usia pada kategori 20-30 Tahun yang berjumlah 5 orang (25%), serata usia pada kategori adalah 41-50 Tahun sebanyak 5 orang (25%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Pelalawan berdominan memiliki usia pada kategori 20-30 Tahun.

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dari hasil penelitian tentang tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan sampah (Studi

Kecamatan Pangkalan Kerinci), serta dengan cara penyebaran kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang Jenjang Pendidikan, karna menurut penulis bahwa pendidikan sangat penting dilihat dalam penelitian ini, hal ini tentunya diniliah dari sudut pandang seseorang yang berpendidikan tinggi akan berbeda dengan seseorang yang memiliki pendidikan yang rendah, untuk lebih jelasnya penulis akan paparkan berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel V.5 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Petugas Kebersihan

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	2	20%
3	SMA	8	80%
4	Diploma	0	0%
5	Sarjana S1/S2	0	0%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian di lapangan, 2019

Dari tabel V.5 di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden Petugas Kebersihan adalah yang dijadikan sampel dalam penelitian yang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci) dominannya adalah pendidikan SMA sebanyak 8 orang (80%), dan yang paling minim adalah petugas yang memiliki pendidikan SMP sebanyak 2 orang (20%)

dari total keseluruhan responden 10 orang Petugas Kebersihan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dominannya petugas kebersihan memiliki pendidikan SMA, untuk menjadi petugas kebersihan pihak Dinas Lingkungan Hidup memiliki minimal atau standar pendidikan yang paling rendah adalah SMP. Walaupun pendidikan sangat mempengaruhi cara berfikir dalam melihat suatu permasalahan tetapi menjadi petugas kebersihan yang lebih penting dikedepankan adalah masalah fisik karna mereka ditugaskan di lapangan.

Tabel V.6 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	10	50%
4	Diploma	4	20%
5	Sarjana S1/S2	6	30%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian di lapangan, 2019

Dari tabel V.6 di atas dapat dilihat bahwa responden masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Impementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci) adalah dominannya berada pada jenjang pendidikan SMA dengan jumlah 10 orang (50%), dan selanjutnya di ikuti oleh responden dengan lulusan pada kategori Sarjana (S1/S2) dengan jumlah responden sebanyak 6 Orang (30%) lalu di ikuti

oleh responden dengan jenjang pendidikan pada kategori Diploma dengan jumlah responden sebanyak 4 orang responden (20%).

B. Hasil Dan Pembahasan Dari Indicator Variabel Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang Nampak. Perhatian yang di maksud yaitu harus di berikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi. (Harbani Pasolong 2013 : 131). Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci) adalah berdasarkan teori dari Edward dalam Widodo (2011: 96-110). Dan indikator-indikator yang akan penulis gunakan dalam mencari hasil dari penelitian ini yang pertama adalah: Komunikasi (*Communication*), Sumber Daya (*Resource*), Disposisi (*Disposition*), Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*). Dan di dalam setiap indikatornya akan di lengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu yang menganalisis tentang indicator Komunikasi maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan juga penjelesan-penjelasan yang di dukung dengan hasil wawancara yang penulis lakukan baik di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian kebijakan atau informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan yang menjadi sasaran (*policy implementors*).

Dalam pengertian lain bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.

Pada penelitian ini komunikasi yang dimaksud adalah cara penyampaian informasi dari Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat cara pengelolaan sampah khususnya di Kabupaten Pelalawan. Yang dimaksud dari pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan dari material sampah. Khususnya pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah yang diwakilkan oleh petugas kebersihan, tetapi hal ini dimulai dari kesadaran masyarakat yang membuang sampah sesuai dengan kategori tong sampah yang sudah disediakan oleh Pemerintah.

Untuk mengetahui lebih lanjutnya, hasil penelitian penulis dari penyebaran kuesioner baik dari petugas kebersihan maupun dari masyarakat, sesuai dengan pertanyaan yang penulis ajukan yaitu Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah, Melakukan koordinasi kepada pemerintahan di masing-masing daerah terkait pengelolaan sampah, Memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait cara pengelolaan sampah, Penulis paparkan berikut:

Tabel V.7 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Petugas Kebersihan Terhadap Indikator Komunikasi

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplemen tasi	Kurang Terimplem entasi	
1	Sosialisasi Terkait Pengelolaan sampah	9 (90%)	1 (10%)	0 (0%)	10 (100%)
2	Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait	8 (80%)	2 (20%)	0 (0%)	10 (100%)
3	Memberikan Penyuluhan Terkait Cara Pengelolaan Sampah	8 (80%)	2 (20%)	0 (0%)	10 (100%)
Jumlah		25	5	0	30
Rata-Rata		8	2	0	10
Persentase		80%	20%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2019

Dari data tabel V.7 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator pertama yang membahas tentang “Komunikasi” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Terimplementasi” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu sebanyak 8 Orang responden Petugas Kebersihan (80%), lalu diikuti dengan jawaban responden Petugas Kebersihan pada kategori “Cukup Terimplementasi” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan sebanyak 2 Orang responden Petugas Kebersihan (20%).

Tabel V.8 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Komunikasi

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terimplem entasi	Cukup Terimplemen tasi	Kurang Terimplem entasi	
1	Sosialisasi Terkait Pengelolaan sampah	2 (10%)	11 (55%)	7 (35%)	20 (100%)

2	Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait	1 (5%)	10 (50%)	9 (45%)	20 (100%)
3	Memberikan Penyuluhan Terkait Cara Pengelolaan Sampah	2 (5%)	8 (35%)	10 (60%)	20 (100%)
Jumlah		5	29	26	60
Rata-Rata		2	10	8	20
Persentase		10%	50%	40%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2019

Dari data tabel V.8 di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator pertama yang membahas tentang “Komunikasi” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Cukup Terimplementasi” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu sebanyak 10 Orang responden Masyarakat (50%), lalu diikuti dengan jawaban responden Masyarakat pada kategori “Tidak Terimplementasi” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan sebanyak 8 Orang responden Masyarakat (40%), sedangkan tanggapan responden yang memberikan pilihan “Terimplementasi” sebanyak 2 orang (10%) dari total keseluruhan responden mencapai 20 orang responden.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan melalui penelitian dengan penyebaran kuesioner yang dilakukan terhadap responden petugas kebersihan dan juga responden yang berasal dari masyarakat, maka penulis akan menyajikan penyeimbang data untuk hasil penelitian ini yang diberikan oleh informan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dimana hal ini diwakilkan oleh Bapak Akhtar, SE Selaku Kabid Pengelolaan Sampah. Adapun hasil wawancara penulis dengan beliau yang berkaitan dengan indicator yang pertama yaitu “Komunikasi” adalah sebagai berikut:

“Kita mengetahui bersama bahwa persoalan sampah menjadi permasalahan tahunan yang tidak ada titik terangnya, karna tentunya sampah-sampah ini merupakan hasil proses kegiatan manusia, kita tidak bisa pungkiri hal tersebut. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa yang paling penting adalah kita terutama masyarakat mengetahui bagaimana cara melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan benar. Jadi masyarakat juga diikutsertakan dalam pengelolaan sampah yang ada dilingkungan sekitarnya. Disini melalui dari peran Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat baik itu secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui media social dan media lainnya, yaitu memberitahukan cara pengelolaan sampah yang dikenal dengan pola 3R yaitu Reuse, Reduce, Recycle. Di dalam melaksanakan Pola ini terutama yang dilakukan adalah kita memberikan arahan terlebih dahulu kepada masyarakat seperti bagaimana mengolah sampah basah, sampah kering, ataupun sampah khusus. Jenis-jenis sampah tersebut tentunya berbeda dalam penanganannya. Hal inilah yang perlu kami berikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat, agar sampah-sampah yang kebanyakan berasal dari sampah rumah tangga dapat diatasi dan diminimalisir”. (Wawancara 27 Juni 2019, Akhtar, SE, selaku Kabid Pengelolaan Sampah)

Selain dari jawaban yang telah penulis dapatkan diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan menanyakan apakah pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan koordinasi terhadap pihak terkait agar pengelolaan sampah dapat dilakukan oleh masyarakat secara merata. Dan jawaban yang diberikan oleh Bapak Akhtar, SE, selaku Kabid Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut:

“Pihak Dinas Lingkungan Hidup tentunya tidak bisa bekerja sendiri, selain kami bekerja sama dengan petugas kebersihan, kami juga melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait dimasing-masing wilayah khususnya di Kabupaten Pelalawan. Seperti pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah-sampah rumah tangga, tentunya pihak Dinas tidak mungkin mengumpulkan seluruh masyarakat di Kota ini ataupun mendatangi ke masing-masing daerah untuk diberikan arahan ataupun sosialisasi, jadi agar informasi bisa sampai kepada masyarakat secara efektif dan efisien, maka kami hanya meminta perwakilan dari setiap wilayah

untuk dapat menghadiri sosialisasi yang kami laksanakan. Setelah itu perwakilan dari setiap wilayahnya tadi, bertanggung jawab sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait pengelolaan sampah”. (Wawancara 27 Juni 2019, Akhtar, SE, selaku Kabid Pengelolaan Sampah)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa pemerintah Dinas Lingkungan Hidup sudah memberikan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Pelalawan, tetapi masih terdapat tumpukan sampah di tepi-tepi jalan, hal ini tentunya bahwa masyarakat tidak bisa mengelola sampah atau mendaur ulang sampah-sampah rumah tangga tersebut, sehingga terjadilah tumpukann sampah yang ada di tepi jalan. Hampir disetiap sudut Ibu Kota Kabupaten Pelalawan ini dipenuhi sampah, yang telah menggunung dan berserak di badan jalan, sehingga menebar bau busuk. Kondisi ini tentunya berbanding terbalik dengan prestasi yang diperoleh dari Kota Pangkalan Kerinci yaitu sebagai salah satu kota kecil terbersih di Indonesia.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (intangible). Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka

implementasi kebijakan tersebut tidak akan mendapatkan hasil yang efektif. Jadi dapat sumber daya yang berkualitas sangat berperan penting terhadap pelaksanaan kebijakan yang di buat. Sumber daya merupakan sebagai penggerak dalam pencapaian tujuannya suatu kebijakan tersebut dibuat. Jadi terkhususnya pada penelitian ini, jika pada Dinas Lingkungan Hidup memiliki sumber daya yang memiliki akuntabilitas yang tinggi maka, tanggung jawab mereka terhadap kebersihan Kabupaten Pelalawan yaitu Kecamatan Kerinci.

Di dalam penelitian ini yaitu tentang Implementasi Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah ini yang terutama dilihat adalah sumber daya. Sumber daya ini terbagi menjadi dua yaitu sumber daya manusia dan sumbe daya anggaran. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah personil atau pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana dan penanggung jawab terhadap pengelolaan sampah, selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah anggaran sebagai penunjang pelaksanaan pengelolaan sampah.

Untuk mengetahui lebih lanjutnya, hasil penelitian penulis dari penyebaran kuesioner baik dari petugas kebersihan maupun dari masyarakat, sesuai dengan pertanyaan yang penulis ajukan yaitu Kecukupan Personil atau Sumber Daya Manusia Dalam Menangani Pengelolaan Sampah, Kecukupan Fasilitas Sarana dan Prasarana dalam Melaksanakan Pengelolaan Sampah, Tersedianya Anggaran Terkait dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah, Penulis paparkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel V.9 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Petugas Kebersihan Terhadap Indikator Sumber Daya

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran	Jumlah
----	---------------	-----------------	--------

		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Kecukupan Personil atau Sumber Daya Manusia	9 (90%)	1 (10%)	0 (0%)	10 (100%)
2	Kecukupan Fasilitas Sarana dan Prasarana	8 (80%)	2 (20%)	0 (0%)	10 (100%)
3	Tersedianya Anggaran	9 (90%)	1 (10%)	0 (0%)	10 (100%)
Jumlah		25	5	0	30
Rata-Rata		8	2	0	10
Persentase		80%	20%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2019

Dari data tabel V.9 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke dua yang membahas tentang “Sumber Daya” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Terimplementasi” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu sebanyak 8 Orang responden Petugas Kebersihan (80%), lalu diikuti dengan jawaban responden Petugas Kebersihan pada kategori “Cukup Terimplementasi” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan sebanyak 2 Orang responden Petugas Kebersihan (20%).

Tabel V.10 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Sumber Daya

No	Sub Indiator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Kecukupan Personil atau Sumber Daya Manusia	2 (10%)	12 (60%)	6 (30%)	20 (100%)

2	Kecukupan Fasilitas Sarana dan Prasarana	1 (5%)	6 (30%)	13 (65%)	20 (100%)
3	Tersedianya Anggaran Untuk Pelaksanaan Pengolaan Sampah	3 (15%)	11 (55%)	6 (30%)	20 (100%)
Jumlah		6	29	25	60
Rata-Rata		2	10	8	20
Persentase		10%	50%	40%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2019

Dari data tabel V.10 di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke dua yang membahas tentang “Sumber Daya” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Cukup Terimplementasi” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu sebanyak 10 Orang responden Masyarakat (50%), lalu diikuti dengan jawaban responden Masyarakat pada kategori “Tidak Terimplementasi” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan sebanyak 8 Orang responden Masyarakat (40%), sedangkan tanggapan responden yang memberikan pilihan “Terimplementasi” sebanyak 2 orang (10%) dari total keseluruhan responden mencapai 20 orang responden.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan melalui penelitian dengan penyebaran kuesioner yang dilakukan terhadap responden petugas kebersihan dan juga responden yang berasal dari masyarakat, maka penulis akan menyajikan penyeimbang data untuk hasil penelitian ini yang diberikan oleh informan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dimana hal ini diwakilkan oleh Bapak Akhtar, SE Selaku Kabid Pengelolaan Sampah. Adapun hasil wawancara

penulis dengan beliau yang berkaitan dengan indicator yang ke dua yaitu “Sumber Daya” adalah sebagai berikut:

“Jika Kita membicarakan sumber daya, tentunya yang menjadi fokus objek kita adalah personil dan anggaran. Di dalam menjalankan Perda Nomor 7 Tahun 2015 ini yaitu tentang pengelolaan sampah, pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah menugaskan personil untuk turun ke lapangan sebagai perwakilan dalam memberikan penyuluhan dan pembinaan tata cara pengelolaan sampah atau mendaur ulang kembali sampah-sampah terutama sampah rumah tangga. Kami menugaskan 2 personil tiap desa di Kecamatan Kerinci. Selain itu pihak Dinas Lingkungan Hidup juga mempunyai personil petugas kebersihan berjumlah sekitar 30 personil, yang memiliki tanggung jawab di lapangan terhadap sampah-sampah yang ada di Kota untuk di angkut ke tempat pembuangan sampah terakhir, dan juga mengelola sampah-sampah tersebut untuk didaur ulang kembali. Selain kecukupan personil, anggaran juga hal yang harus di prioritaskan, karna apabila tidak ada anggaran atau dana tentunya kita tidak bisa melakukan apapun khususnya dalam pengelolaan sampah ini. Anggaran ini tentunya dari APBD daerah, yang difokuskan untuk penyediaan fasilitas-fasilitas dalam pengelolaan sampah, yang dimulai dari penyediaan tong sampah ditepi-tepi jalan, bak sampah, penyediaan tempah pembuangan sementara, dan truk untuk pengangkutan sampah” (Wawancara 27 Juni 2019, Akhtar, SE, selaku Kabid Pengelolaan Sampah)

Selain dari jawaban yang telah penulis dapatkan diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan menanyakan apakah pihak Dinas Lingkungan Hidup menyediakan fasilitas untuk melakukan pengelolaan sampah khususnya di Kecamatan Kerinci Dan jawaban yang diberikan oleh Bapak Akhtar, SE, selaku Kabid Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut:

“Untuk melaksanakan pengelolaan sampah ini dibutuhkannya fasilitas atau sarana dan prasarana. Pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah menyediakan sarana dana prasarana yang dibutuhkan seperti tong sampah di tepi tepi jalan sesuai dengan yang dibutuhkan, selain itu pihak Dinas juga menyediakan truk untuk pengangkutan sampah ke pembuangan terakhir yaitu berjumlah 23 yang terdiri dari 20 truk

besar dan 5 pick up, selanjutnya menyediakan bak bak sampah untuk menampung sampah-sampah rumah tangga, dan menyediakan tempat pembuangan sampah terakhir serta tempat pengelolaan sampah”. (Wawancara 27 Juni 2019, Akhtar, SE, selaku Kabid Pengelolaan Sampah)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, penulis menemukan bahwa apabila pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah menyediakan sarana dan prasarana seperti bak sampah atau tong sampah seharusnya tidak terdapat lagi sampah-sampah yang berserakan di jalan. Dari hasil pantauan penulis, terdapat beberapa titik kepadatan sampah di Ibu Kota Pangakalan Kerinci yang paling parah terlihat disepanjang Jalan Batin Lalang dan juga Jalan Arifin Kelurahan Kerinci Timur atau tak jauh berada dari Kantor Polres Pelalawan. Sampah rumah tangga yang terbungkus kantong plastik atau karung tersebut, tampak menumpuk dan berserakan di badan kedua jalan itu. Sampah-sampah itu sengaja dibuang warga yang rumahnya berada di sepanjang pinggir jalan, lantaran mereka tidak memiliki bak sampah.

3. Disposisi

Disposisi adalah kualitas karakter, kebiasaan, persiapan, kondisi, kesiapan, atau kecenderungan atau bertindak dengan cara tertentu yang dapat dipelajari. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Disposisi merupakan kecenderungan untuk berlaku dengan cara tertentu. Disposisi berbeda dari emosi (perasaan) karna disposisi tidak menyampaikan laporan tentang suasana hati seorang pada saat

tertentu, tetapi melaporkan seperangkat kecondongan umum. Disposisi dalam arti yang luas berarti kemampuan mempengaruhi atau menanggung sesuatu. Jika dipahami dengan cara ini, disposisi sama dengan potensi subyektif. Namun, biasanya disposisi digunakan dalam arti lebih sempit, yaitu kesiapan bawaan dari makhluk hidup untuk melakukan aktivitas tertentu, pasifitas, reaksi, perkembangan, dan sebagainya.

Di dalam penelitian ini disposisi merupakan suatu sikap implementer untuk melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah pada Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Yang diperlukan dalam menjalankan kebijakan ini, agar dapat menghasilkan suatu yang optimal, adalah implementor yang bijaksana, adil, bertanggung jawab, dan transparan. Karena apabila pelaksana kebijakan tidak memiliki sikap yang baik dan bijaksana, maka maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya pun sesuai dengan proses pelaksanaannya, jika pelaksanaannya tidak baik maka hasilnya pun tentu tidak baik pula, sebaliknya apabila pada proses pelaksanaannya baik, maka hasilnya pun akan baik.

Untuk mengetahui lebih lanjutnya, hasil penelitian penulis dari penyebaran kuesioner baik dari petugas kebersihan maupun dari masyarakat, sesuai dengan pertanyaan yang penulis ajukan yaitu Pemahaman dan Pengetahuan dari SDM terkait Pengelolaan Sampah, Adanya Pengawasan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Terkait Pelaksanaan Pengelolaan Sampah, Adanya Komitmen dari Pemerintahan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah. Penulis paparkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel V.11 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Petugas Kebersihan Terhadap Indikator Disposisi

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terimplemen tasi	Cukup Terimplem entasi	Kurang Terimplemen tasi	
1	Pemahaman dan Pengetahuan dari SDM terkait Pengelolaan Sampah	8 (80%)	2 (20%)	0 (0%)	10 (100%)
2	Adanya Pengawasan	6 (60%)	4 (40%)	0 (0%)	10 (100%)
3	Adanya Komitmen	7 (70%)	3 (30%)	0 (0%)	10 (100%)
Jumlah		21	9	0	30
Rata-Rata		7	3	0	10
Persentase		70%	30%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2019

Dari data tabel V.11 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke tiga yang membahas tentang “Disposisi” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Terimplementasi” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu sebanyak 7 Orang responden Petugas Kebersihan (70%), lalu diikuti dengan jawaban responden Petugas Kebersihan pada kategori “Cukup Terimplementasi” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan sebanyak 3 Orang responden Petugas Kebersihan (30%).

Tabel V.12 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Disposisi

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran	Jumlah
----	---------------	-----------------	--------

		Terimplem entasi	Cukup Terimplem entasi	Kurang Terimplem entasi	
1	Pemahaman dan Pengetahuan dari SDM terkait Pengelolaan Sampah	2 (10%)	12 (60%)	6 (30%)	20 (100%)
2	Adanya Pengawasan	1 (5%)	1 (5%)	18 (90%)	20 (100%)
3	Adanya Komitmen	1 (5%)	14 (70%)	5 (25%)	20 (100%)
Jumlah		4	27	29	60
Rata-Rata		1	9	10	20
Persentase		5%	45%	50%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2019

Dari data tabel V.12 di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke tiga yang membahas tentang “Disposisi” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Tidak Terimplementasi” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu sebanyak 10 Orang responden Masyarakat (50%), lalu diikuti dengan jawaban responden Masyarakat pada kategori “Cukup Terimplementasi” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan sebanyak 9 Orang responden Masyarakat (45%), sedangkan tanggapan responden yang memberikan pilihan “Terimplementasi” sebanyak 1 orang (5%) dari total keseluruhan responden mencapai 20 orang responden.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan melalui penelitian dengan penyebaran kuesioner yang dilakukan terhadap responden petugas kebersihan dan juga responden yang berasal dari masyarakat, maka penulis akan

menyajikan penyeimbang data untuk hasil penelitian ini yang diberikan oleh informan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dimana hal ini diwakilkan oleh Bapak Akhtar, SE Selaku Kabid Pengelolaan Sampah. Adapun hasil wawancara penulis dengan beliau yang berkaitan dengan indicator yang ke tiga yaitu “Disposisi” adalah sebagai berikut:

“Untuk pemahaman tentang pengelolaan sampah dari pihak Dinas Lingkungan Hidup ini tentunya sudah cukup bagus dan hampir menguasai semua tata cara pengelolaan sampah ini. Karna sebelum melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat, personil dari pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah diberikan pelatihan dan pembinaan, setelah mereka benar-benar menguasai barulah kami kirim personil untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Di dalam pelatihan itu, kami memberikan ilmu tentang bagaimana cara mengelola sampah yang mudah terurai dengan sampah yang tidak mudah terurai, karna cara pengelolaan dari ke dua jenis bahan sampah ini tentunya berbeda, kalau bahan yang bisa terurai contohnya seperti sampah rumah tangga, yaitu sayur-sayuran, sisa ikan, ataupun bahan-bahan alamnya yang lain, ini bisa diaur ulang menjadi pupuk kompos dan bisa digunakan untuk penyubur lainnya, nah kalau bahan yang tidak mudah terurai itu seperti sampah plastik, botol kaca, kaleng, pembalut, maupun popok bayi, dan lain sebagainya, ini apabila dikubur dalam tanah membutuhkan waktu yang lama agar bisa terurai, maka dari itu kita bisa mendaur ulangnya kembali seperti kaleng dan botol botol atau bahan plastic lainnya bisa dijadikan kerajinan tangan sehingga bisa bernilai ekonomis, dan yang tidak bisa diaur ulang harus kita bakar atau hancurkan. Dan didalam pelaksanaannya di lapangan kami terus memantau atau melakukan pengawasan ke lapangan, baik itu dari segi pelaksanaan sosialisasi, mengecek apakah sosialisasi sudah dilaksanakan secara merata sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui cara pengelolaan sampah rumah tangga. Selain itu melihat berhasil atau tidaknya sosialisasi yang kita berikan maka akan dapat diketahui dari volume sampah yang ada ditepi jalan, apabila masih banyak sampah yang bertebaran tidak sesuai dengan tempatnya dan bahkan tidak pisahkan mana sampah yang organik dan yang anorganik, maka kita harus menganalisis dimana kesalahannya, apakah pada sosialisasi yang tidak merata atau kondisi bak dan tong sampah yang tidak memadai, selain itu tentunya kinerja dari petugas

kebersihan selalu kami cek dan evaluasi. Tetapi yang paling terpenting adalah kesadaran dari masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan harus menjadi masyarakat yang kreatif untuk mengolah sampah-sampah menjadi kreatif. ” (Wawancara 27 Juni 2019, Akhtar, SE, selaku Kabid Pengelolaan Sampah)

Selain dari jawaban yang telah penulis dapatkan diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan menanyakan bagaimana komitmen yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Kerinci ini, agar sampah-sampah yang menjadi permasalahan dapat diubah menjadi bermanfaat dan bernilai ekonomis. Dan jawaban yang diberikan oleh Bapak Akhtar, SE, selaku Kabid Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut:

“Apabila ditanya komitmen, tentunya kami sangat berkomitmen tinggi, bahkan saat sekarang penyuluhan ataupun sosialisasi tidak hanya kepada masyarakat saja, tetapi kami menyadari hal ini juga harus ditanami sejak dini, oleh karna itu kami memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pelalawan khususnya Di Kecamatan Kerinci. Agar anak-anak bisa antusias melakukan apa yang kita perintahkan, maka harus ada inovatifnya, yaitu membuat Bank Sampah, jadi sampah-sampah yang bisa di daur ulang seperti bahan plastic, kaca dan lain sebagainya, mereka kumpulkan dan serahkan ke Bank Sampah, maka sampah-sampah tersebut kita tukar dengan uang. Dan hal ini juga berlaku terhadap masyarakat umumnya. Selain itu kami memberikan pelatihan seperti membuat tas dari plastik permen, plastik-plastik rinso, dan membuat bunga dari botol-botol plastik. Usaha ini terus kami gencarkan sehingga sampah-sampah dapat dikelola dengan baik, dan masalah sampahpun dapat diminimalisir.”. (Wawancara 27 Juni 2019, Akhtar, SE, selaku Kabid Pengelolaan Sampah)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, penulis menemukan bahwa ada beberapa titik-titik kepadatan sampah di Ibukota Pangkalankerinci yang paling parah berada di sepanjang bahu Jalan Lintas Timur, Jalan Pemda, Jalan Raja, Jalan Pelita, Jalan Wajib Senyum serta sejumlah ruas jalan lainnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Sampah-sampah ini tidak hanya

mengakibatkan timbulnya bau busuk di jalan, tetapi bahkan sampai membuat aliran selokan atau drainase menjadi tersumbat. Hal ini tentunya menggambarkan tingkat keseriusan atau komitmen dari pihak terkait yang rendah, dan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dapat dikatakan belum berjalan dengan baik dan perlu dikoreksi kembali.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Jadi struktur birokrasi ini harus jelas dan system birokasinya harus di rampngkan kembali, agar kerja yang di lakukan tidak tumpang tindih dan lebih efektif. Struktur birokrasi yang baik akan membuat tujuan dari organisasi tercapai sesuai dengan direncanakan.

Penataan dan penyusunan organisasi adalah berkenaan dengan tindakan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dengan mengadakan perubahan dalam struktur formal dari hubungan tugas dan wewenang. Struktur yang baik sebuah organisasi adalah yang mendukung upaya kinerja yang efektif dan yang meminimalkan kompleksitas. Struktur birorasi atau struktur organisasi sangat penting dalam suatu instansi termasuk pada Dinas Lingkungan Hidup khususnya

pada Kecamatan Pangkalan Kerinci. Dinas Lingkungan Hidup pada umumnya bertugas untuk meningkatkan kebersihan Kota atau wilayah dan meminilisir permasalahan sampah dengan memperbaiki tingkat pengelolaan sampah. Apabila pengelolaan sampah sudah baik, maka dapat permasalahan sampah dapat diselesaikan dengan efektif.

Untuk mengetahui lebih lanjutnya, hasil penelitian penulis dari penyebaran kuesioner baik dari petugas kebersihan maupun dari masyarakat, sesuai dengan pertanyaan yang penulis ajukan yaitu Memiliki Standar Operasional (SOP) Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah, Adanya Unit Kerja Khusus Dibidang Pengelolaan Sampah, Upaya Tindakan Tegas Dalam Melaksanakan Pengelolaan Sampah. Penulis paparkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel V.13 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Petugas Kebersihan Terhadap Indikator Struktur Birokrasi

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terimplemen tasi	Cukup Terimplemen tasi	Kurang Terimple mentasi	
1	Memiliki Standar Operasional (SOP)	9 (90%)	1 (10%)	0 (0%)	10 (100%)
2	Adanya Unit Kerja Khusus Dibidang Pengelolaan Sampah	7 (70%)	3 (30%)	0 (0%)	10 (100%)
3	Upaya Tindakan Tegas	8 (80%)	2 (20%)	0 (0%)	10 (100%)
Jumlah		24	6	0	30
Rata-Rata		8	2	0	10
Persentase		80%	20%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2019

Dari data tabel V.13 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke empat yang membahas tentang “Struktur Birokrasi”

adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Terimplementasi” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu sebanyak 8 Orang responden Petugas Kebersihan (80%), lalu diikuti dengan jawaban responden Petugas Kebersihan pada kategori “Cukup Terimplementasi” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan sebanyak 2 Orang responden Petugas Kebersihan (20%).

Tabel V.14 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Struktur Birokrasi

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Memiliki Standar Operasional (SOP)	2 (10%)	14 (70%)	4 (20%)	20 (100%)
2	Adanya Unit Kerja Khusus Dibidang Pengelolaan Sampah	1 (5%)	12 (60%)	7 (35%)	20 (100%)
3	Upaya Tindakan Tegas	4 (20%)	2 (10%)	14 (70%)	20 (100%)
Jumlah		7	28	25	60
Rata-Rata		2	10	8	20
Persentase		10%	50%	40%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2019

Dari data tabel V.14 di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke empat yang membahas tentang “Struktur Birokrasi” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Cukup Terimplementasi” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu sebanyak 10 Orang responden Masyarakat (50%), lalu diikuti dengan jawaban responden

Masyarakat pada kategori “Tidak Terimplementasi” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan sebanyak 8 Orang responden Masyarakat (40%), sedangkan tanggapan responden yang memberikan pilihan “Terimplementasi” sebanyak 2 orang (10%) dari total keseluruhan responden mencapai 20 orang responden.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatkan melalui penelitian dengan penyebaran kuesioner yang dilakukan terhadap responden petugas kebersihan dan juga responden yang berasal dari masyarakat, maka penulis akan menyajikan penyeimbang data untuk hasil penelitian ini yang diberikan oleh informan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dimana hal ini diwakilkan oleh Bapak Akhtar, SE selaku Kabid Pengelolaan Sampah. Adapun hasil wawancara penulis dengan beliau yang berkaitan dengan indikator yang ke empat yaitu “Struktur Birokrasi” adalah sebagai berikut:

“Di dalam sebuah dinas pastinya sudah di atur tentang standar pelayanan atau standar kerjanya, bukan hanya di dinas ya, di setiap perusahaan atau organisasi yang memiliki badan hukum pastinya sudah harus ada standar operasionalnya, dan kita pasti melakukan dan juga menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada sesuai dengan standar prosedur yang telah di tetapkan oleh pimpinan. Pelaksanaan kebijakan yang di tugaskan ke Dinas Lingkungan Hidup pastinya memiliki struktur organisasi dan struktur organisasinya juga dapat di lihat, dan di dalam struktur tersebut bagian yang menangani bidang pengelolaan sampah ini masuk ke dalam bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3, di dalam bidang ini juga terdapat seksi-seksi pengurangan sampah, pembagian tugas ini agar tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan optimal dan tidak adanya tumpukan tindh dalam melaksanakan tugas khususnya pada Dinas Lingkungan Hidup” (Wawancara 27 Juni 2019, Akhtar, SE, selaku Kabid Pengelolaan Sampah)

Selain dari jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, penulis juga melakukan wawancara dengan menanyakan apa tindakan tegas yang diberikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat yang tidak mengindahkan sosialisasi atau penyuluhan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengelolaan sampah. Dan jawaban yang diberikan oleh Bapak Akhtar, SE, selaku Kabid Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut:

“Kalau kita lihat memang masih ada oknum warga yang membuang sampah sembarangan, makanya saya instruksikan kepada Pak Camat, Kepala Desa dan perangkatnya dari mulai dari RT/RW sampai Linmas untuk bersama-sama, apabila ada oknum yang membuang sampah sembarangan, kalau bisa ditangkap dan dibina. Tetapi walaupun sudah dilakukannya seperti itu, masyarakat masih tetap membuang sampah sembarangan dengan cara sembunyi-sembunyi, bahkan ada yang membuang sampah di tepi jalan pada dini hari. Hal ini bagaimanapun sanksi yang kita berikan kepada oknum, tetap saja tidak bisa dilaksanakan secara optimal apabila tidak adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Jadi diharapkan kepada masyarakat agar bisa bekerja sama untuk menjaga kebersihan, dan dapat mengelola sampah sebagaimana yang sudah disosialisasikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup”. (Wawancara 27 Juni 2019, Akhtar, SE, selaku Kabid Pengelolaan Sampah)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, penulis menemukan bahwa tindakan tegas berupa sanksi yang diberikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup belum mendapatkan hasil yang optimal, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum bisa menyadari akan kebersihan Kota. Jadi sebaik dan setegas apapun pihak Dinas Lingkungan Hidup menegakkan peraturan tentang kebersihan, apabila dari masyarakat itu sendiri tidak memiliki kesadaran maka, hasilnya pun tidak akan optimal.

C. Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden terkait dengan Penelitian Yang Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)

Pada implementasi peraturan atau kebijakan yang perlu diperhatikan adalah empat (4) aspek agar dapat terealisasi dengan baik dan optimal, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Komunikasi yang baik kepada masyarakat ataupun pihak terkait lainnya maka maksud dan tujuan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk meminimalisir permasalahan sampah akan tercapai dan bisa dilaksanakan oleh objek yang diberikan sosialisasi atau penyuluhan seperti masyarakat. Selanjutnya adalah sumber daya yang cukup dan memadai, sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang berkualitas, dan anggaran yang memadai untuk mencukupi sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah. Selain dari komunikasi yang baik dan sumber daya yang cukup, hal yang terpenting juga pada disposisi atau sikap dari implementor yang baik, tegas, dan bijaksana. Dan yang terakhir adalah struktur birokrasi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dari Dinas atau Instansi tersebut.

Di dalam keberhasilan dalam suatu pelaksanaan kebijakan atau peraturan adalah adanya kerja sama antara pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan masyarakat. Karena di dalam pengelolaan sampah ini yang menjadi objek yang paling penting adalah Dinas dan masyarakat. Dinas yang menatur dan menjalankan strateginya agar pengelolaan sampah dapat tercapai, dan masyarakat yang menjadi pelaksana dalam membantu Dinas agar tujuannya menjadi tercapai. Peran masyarakat disini adalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh pihak Dinas, yaitu melaksanakan pengelolaan sampah sederhana dari sampah-sampah

yang berasal dari rumah tangga, sehingga tidak terjadi tumpukkan sampah di tepi tepi jalan

Selanjutnya untuk mengetahui hasil akhir dari jawaban responden baik dari petugas kebersihan yang merupakan perwakilan dari Dinas maupun dari masyarakat, yang dikur dengan teori yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, maka penulis paparkan rekapitulasi dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel V.15 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Petugas Kebersihan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)

No	Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Komunikasi	8 (80%)	2 (20%)	0 (0%)	10 (100%)
2	Sumber Daya	8 (80%)	2 (20%)	0 (0%)	10 (100%)
3	Disposisi	7 (70%)	3 (30%)	0 (0%)	10 (100%)
4	Struktur Birokrasi	8 (80%)	2 (20%)	0 (0%)	10 (100%)
Jumlah		31	9	0	40
Rata-Rata		8	2	0	30
Persentase		83%	17%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2019

Berdasarkan data pada tabel V.15 di atas dan dari hasil pengamatan penulis di lapangan secara langsung dan rekapitulasi data yang disajikan di atas,

maka dapat dijelaskan bahwa dari total jumlah responden Petugas Kebersihan yang menjadi sampel pada penelitian ini berdasarkan pendekatan-pendekatan indikator yang penulis lakukan yaitu di antaranya “Komunikasi”, “Sumber Daya”, “Disposisi”, “Struktur Birokrasi”. Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil dari rekapitulasi keseluruhan data dari jawaban keseluruhan responden Petugas Kebersihan pada kategori jawaban “Terimplementasi” dengan total rata-rata dari keseluruhan jumlah responden yang memberikan jawabannya adalah sebanyak 8 atau jika di persentasekan yang mencapai jumlah 83% Orang Petugas Kebersihan.

Tabel V.16 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Kecamatan Pangkalan Kerinci)

No	Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Komunikasi	2 (10%)	10 (50%)	8 (40%)	20 (100%)
2	Sumber Daya	2 (10%)	10 (50%)	8 (40%)	20 (100%)
3	Disposisi	1 (5%)	9 (45%)	10 (50%)	20 (100%)
4	Struktur Birokrasi	2 (10%)	10 (50%)	8 (40%)	20 (100%)
Jumlah		7	39	34	80
Rata-Rata		2	10	8	20
Persentase		10%	50%	40%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2019

Berdasarkan data pada tabel V.16 di atas dan dari hasil pengamatan penulis di lapangan secara langsung dan rekapitulasi data yang disajikan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari total jumlah responden Masyarakat yang menjadi sampel pada penelitian ini berdasarkan pendekatan-pendekatan indikator yang penulis lakukan yaitu di antaranya “Komunikasi”, “Sumber Daya”, “Disposisi”, “Struktur Birokrasi”. Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil dari rekapitulasi keseluruhan data dari jawaban keseluruhan responden Masyarakat pada kategori jawaban “Cukup Terimplementasi” dengan total rata-rata dari keseluruhan jumlah responden yang memberikan jawabannya adalah sebanyak 10 atau jika di persentasekan yang mencapai jumlah 50% Orang Masyarakat.

Selanjutnya penulis akan menyajikan faktor-faktor kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, adapun kendala-kendala tersebut adalah:

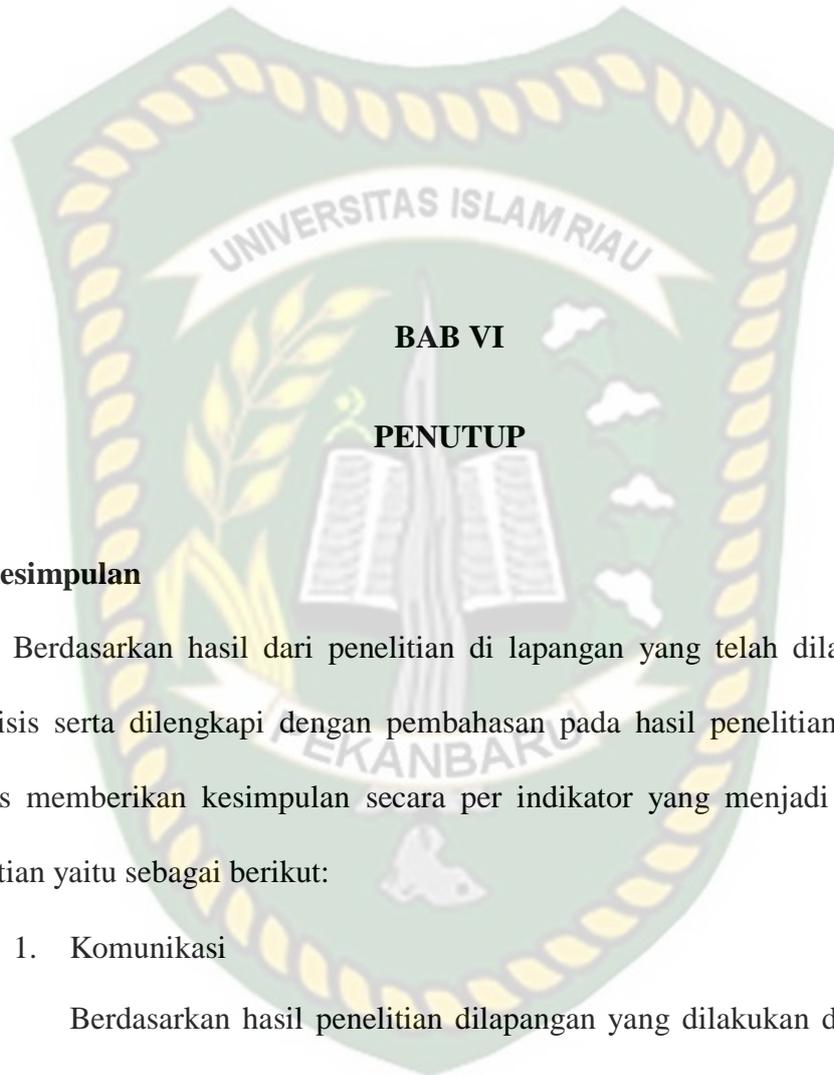
D. Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di lapangan tentu mengalami kendala yang menjadi penghambat proses pelaksanaannya, hal ini berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan melalui wawancara dengan informan pada penelitian, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Ya tentunya di dalam menjalankan tugas atau melaksanakan suatu kebijakan, pasti ada hambatan yang menjadi kendala berjalannya kebijakan tersebut dengan baik, adapun yang menjadi kendala dalam melaksanakan pengelolaan sampah ini adalah dikarenakan keterbatasan personil baik dari personil untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun personil yang bertugas di lapangan untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA, selain itu juga terdapat keterbatasan dana untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana dalam melaksanakan pengelolaan sampah, dan juga keterbatasan waktu jam operasional dalam melakukan pengangkutan sampah ke TPA, sehingga itulah yang menyebabkan banyaknya sampah yang menumpuk di tepi-tepi jalan” (Wawancara 27 Juni 2019, Akhtar, SE, selaku Kabid Pengelolaan Sampah)

Selain itu juga ada hambatan yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengelolaan sampah, adapun hambatannya penulis dapatkan dengan cara melakukan wawancara, adapun hasil wawanacaranya adalah sebagai berikut:

“Selain kendala itu berasal dari kami yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup, yang juga menjadi permasalahan sehingga belum bisa melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik adalah dikarenakan kurangnya pemahaman dan tingkat kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah sederhana sesuai dengan yang sudah disosialisasikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup, sehingga mengakibatkan sampah-sampah menjadi bertumpuk dan tidak terbendung lagi, karna walau bagaimanapun pihak Dinas menyediakan sarana dan prasana dan juga memberikan sosialisasi tentang pengelolaan sampah, tetapi tidak adanya kesadaran dari masyarakat, itu hanya akan menjadi sia-sia”.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan yang telah dilakukan dan dianalisis serta dilengkapi dengan pembahasan pada hasil penelitian ini. Maka penulis memberikan kesimpulan secara per indikator yang menjadi tolak ukur penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada setiap responden yang dijadikan sampel, maka penulis menemukan kesimpulan untuk indikator yang pertama yang membahas tentang “Komunikasi” dimana indikator ini memiliki item penilaian sebanyak 3 item yaitu “Sosialisasi terkait pengelolaan sampah, Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, Memberikan

penyuluhan terkait cara pengelolaan sampah”, maka jawaban yang dihasilkan untuk indikator yang pertama adalah jawaban dengan kategori “Cukup Terimplementasi”, hal ini dikarenakan bahwa ada beberapa item penilaian yang belum berjalan secara maksimal seperti memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, karna berdasarkan observasi penulis di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara pengelolaan sampah atau mendaur ulangannya kembali sehingga terjadilah tumpukann sampah yang ada di tepi jalan.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada setiap responden yang dijadikan sampel, maka penulis menemukan kesimpulan untuk indikator yang pertama yang membahas tentang “Sumber Daya” dimana indikator ini memiliki item penilaian sebanyak 3 item yaitu “Kecukupan personil atau sumber daya manusia, kecukupan fasilitas sarana dan prasarana, Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan pengelolaan sampah”, maka jawaban yang dihasilkan untuk indikator yang ke dua adalah jawaban dengan kategori “Cukup Terimplementasi”, hal ini dikarenakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaanya di lapangan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah khususnya pengelolaan sampah rumah tangga, karna jika dilihat dari penyediaan sarana dan prasarana, pemerintah

sudah menyediakan tong sampah atau bak sampah di setiap jalan agar sampah-sampah masyarakat tidak menumpuk dan melimpah sehingga berserak di tepi-tepi jalan. Dari hasil pantauan penulis, terdapat beberapa titik kepadatan sampah di Ibu Kota Pangkalan Kerinci yang paling parah terlihat disepanjang Jalan Batin Lalang dan juga Jalan Arifin Kelurahan Kerinci Timur atau tak jauh berada dari Kantor Polres Pelalawan.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada setiap responden yang dijadikan sampel, maka penulis menemukan kesimpulan untuk indikator ke tiga yang membahas tentang “Disposisi” dimana indikator ini memiliki item penilaian sebanyak 3 item yaitu “Pemahaman dan pengetahuan dari SDM terkat pengelolaan sampah, adanya pengawasan, adanya komitmen”, maka jawaban yang dihasilkan untuk indikator yang ke tiga adalah jawaban dengan kategori “Cukup Terimplementasi”, hal ini dikarnakan bahwa dari ke tiga item ini ada beberapa yang tidak berjalan dengan baik, seperti kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang membuang sampah yang tidak pada tempatnya. Permasalahan ini juga didukung dari hasil observasi penulis di lapangan bahwa ada beberapa titik-titik kepadatan sampah di Ibukota Pangkalankerinci yang paling parah berada di sepanjang bahu Jalan Lintas Timur, Jalan Pemda, Jalan

Raja, Jalan Pelita, Jalan Wajib Senyum serta sejumlah ruas jalan lainnya di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada setiap responden yang dijadikan sampel, maka penulis menemukan kesimpulan untuk indikator ke empat yang membahas tentang “Struktur Birokrasi” dimana indikator ini memiliki item penilaian sebanyak 3 item yaitu “Memiliki standar operasional (SOP), Adanya unit kerja khusus di bidang pengelolaan sampah, upaya tindakan tegas”, maka jawaban yang dihasilkan untuk indikator yang ke empat adalah jawaban dengan kategori “Cukup Terimplementasi”, hal ini dikarenakan bahwa dari ke tiga item ini ada beberapa yang tidak berjalan dengan baik, seperti kurangnya tindakan tegas yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang dengan sengaja membuang sampah sembarangan, disamping itu tentunya dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mengelola sampah, agar kota menjadi bersih dan sehat.

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di lapangan tentu mengalami kendala yang menjadi penghambat proses pelaksanaannya, hal ini berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Akhtar, SE, selaku Kabid Pengelolaan Sampah, dapat penulis simpulkan yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pengelolaan sampah adalah dikarenakan

keterbatasan personil baik dari personil untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun personil yang bertugas di lapangan untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA, selanjutnya adalah dikarenakan keterbatasan dana untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana dalam melaksanakan pengelolaan sampah selain itu juga keterbatasan waktu jam operasional juga menjadi salah satu kendala dalam melakukan pengangkutan sampah ke TPA, sehingga banyak sampah yang menumpuk di tepi-tepi jalan, dan kendala yang terkakhir dalam pengelolaan sampah ini adalah karna kurangnya pemahaman dan tingkat kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah sederhana sesuai dengan yang sudah disosialisasikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup, sehingga mengakibatkan sampah-sampah menjadi bertumpuk dan tidak terbendung lagi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi Pemerintahan khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan. Dan juga saran yang penulis berikan juga berlaku bagi masyarakat dan pembaca skripsi ini. Saran yang akan penulis berikan kepada pihak-pihak di atas adalah:

1. Kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan agar dapat memenuhi sumber daya manusia atau personil yang bertugas memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan juga personil untuk mengangkat sampah, sesuai dengan yang dibutuhkan di lapangan.
2. Pihak Dinas Lingkungan Hidup agar dapat menggunakan anggaran dana semaksimal mungkin untuk pengelolaan sampah, agar dana

untuk penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah akan terpenuhi, dan pelaksanaan pengelolaan sampah akan dilaksanakan dengan efektif.

3. Kepada Dinas Lingkungan Hidup bersama Petugas Kebersihan agar dapat menambah waktu operasional atau dengan pembagian shift bertugas, dan dapat dilaksanakan dengan tertib untuk pengangkutan sampah ke TPA, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah.
4. Untuk masyarakat itu sendiri, agar dapat meningkatkan kesadarannya dalam melaksanakan pengelolaan sampah secara sederhana, agar tidak terjadi penumpukan sampah dimana-mana.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adisasmta, Rahardjo, 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1982. *Administrasi Dan Management Umum*. Jakarta. Ghalla Indonesia.
- Danang, 2012. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn. 1993. *Policy Analysis for the Real World*. Oxford University Press.
- Islamy. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lineberry, Robert and Ira Sharkansky. 1978. *Urban Politics and Public Policy*. New York: Harper & Row.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins

- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu .2005. *Kybernologi beberapa konstuksi utama*, Jakarta :PT. Rhineka sirao Credantia Center.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta..
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (ilmu pemerintahan)*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi Implemetasi dan Evaluasi*, Jakarta :PT Elex Media Komputindo.
- Rasyid, Muhammad Ryaas, 1997. *Makna Pemerintahan Ditinjau Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yasir Watampone.
- Riduwan, 2009. *Skala Pengukuran Variable-Variable Penelitian*. Bandung. Alfabeta.
- Subarsono.2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta.
- Syafaruddin, 2008. *Efektifitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Syafiie,Kencana, 2008. *Perbandingan Pemerintahan*. Bandung. PT.Refika Aditama.
- Syafiie,Kencana. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Syafiie,Kencana,2011. *Ekologi Pemerintahan*. Bandung. Pustaka Reka Cipta.
- Syafiie,Kencana,2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Suryadinata, 2012. *Skripsi Ilmu Pemerintahan Rijalul Fikri*. Pekanbaru. Perpustakaan Fisipol Uir.
- Suryadinata. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Usman, Husaini, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Kedua. Jakarta. Bumi Askara.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung : CV Sinar Baru.
- Wibawa Samodra. 2001. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta :Graha Ilmu.

Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Yogyakarta : Media Pressindo.

Wirawan. 2012. *Evaluasi:Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Zulkifli Dkk. 2013. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa*. FISIPOL UIR : Pekanbaru.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2010 Pasal 8 Tentang Rincian Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.